



PEMERINTAH  
KOTA  
MAGELANG

2024

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Magelang, 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



**NANANG KRISTIYONO. S.STP, MSi.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790517 199802 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Tahun 2024 dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis " Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah":
  - a. Diukur dengan indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - b. Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 91,43%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja BPKAD telah melebihi target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 109,37%.
  - c. Dibandingkan dengan capaian realisasi target tahun 2023 yang sebesar 100% terjadi peningkatan sebesar 9,37%.
  - d. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sasaran strategis " Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Barang Milik Daerah":
  - a. Diukur dengan indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - b. Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 92,64%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 99,35%. Dengan demikian kinerja BPKAD telah melebihi target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 107,25%.
  - c. Dibandingkan dengan capaian realisasi target tahun 2023 yang sebesar 99,35% terjadi peningkatan sebesar 7,9%.
  - d. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Sasaran strategis " Meningkatkan Pendapatan Daerah":
  - a. Diukur dengan indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
  - b. Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 25,81%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 34,05%. Dengan demikian kinerja BPKAD telah melebihi target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 131,95%.
  - c. Dibandingkan dengan capaian realisasi target tahun 2023 yang sebesar 33,51% terjadi peningkatan sebesar 0,54%.

- d. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ke depan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal;
- 3) Peningkatan standar mutu pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta dukungan data yang valid. Sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- 6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat keputusan Wali Kota Magelang nomor 060/239/112 tahun 2024 tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .....iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL.....viii

DAFTAR GAMBAR ..... ix

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    1.1 Cascading Kinerja..... 1

    1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi..... 2

    1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan..... 3

    1.4 Isu-isu Strategis..... 7

    1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran ..... 9

    1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....13

    2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....13

    2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....15

    2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....15

    2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....19

    2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....28

    3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....31

    3.2 Capaian Kinerja Lainnya .....54

    3.3 Realisasi Anggaran.....56

    3.4 Inovasi.....57

    3.5 Lintas Sektor..... 58

BAB IV PENUTUP .....62

    4.1 Simpulan.....62

    4.2 Langkah Perbaikan Kinerja..... 63

LAMPIRAN .....65

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....66

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....68

LHE SAKIP TAHUN SEBELUMNYA .....70

SK PENETAPAN IKU .....86

RENCANA AKSI.....91

LAPORAN MONEV RENAKSI.....91

PENGHARGAAN .....92

DRAFT RENCANA AKSI 205.....93

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi ..... 9

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana ..... 10

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024 ..... 11

Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ..... 13

Tabel II.1 Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Renstra) ..... 15

Tabel II.2 Strategi dan arah Kebijakan ..... 15

Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian  
Sasaran Tahun 2024 ..... 16

Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 ..... 18

Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2024 ..... 21

Tabel II.4.2 Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2024 ..... 20

Tabel II.4.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2024 ..... 23

Tabel II.4.4 Perubahan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2024 ..... 24

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..... 31

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 ..... 32

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan ..... 33

Tabel III.4.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya  
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 35

Tabel III.4.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya  
Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ..... 36

Tabel III.4.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya  
Pendapatan Daerah ..... 37

Tabel III.5.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya  
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 39

Tabel III.5.2 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya  
Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ..... 45

Tabel III.5.3 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya  
Pendapatan Daerah ..... 48

Tabel III.5.4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Strategis  
BPKAD Kota Magelang ..... 50

Tabel III.6 Kontribusi Sasaran BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024 ..... 55

Tabel III.7 Kontribusi Program BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kota Magelang ..... 56

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024 ..... 56

Tabel III.9 Inventarisasi Lintas Sektor BPKAD Kota Magelang ..... 58

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar I. 1 Cascading Kinerja ..... 2

Gambar I. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur BPKAD ..... 2

Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah..... 4

Gambar II.1 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Laporan  
di Smart Magelang..... 23

Gambar II.2 Instagram BPKAD Kota Magelang ..... 24

Gambar II.3 Website BPKAD Kota Magelang ..... 24

Gambar II.4 Aplikasi Pak Dewo (Pajak Daerah Online) ..... 24

Gambar II.5 Aplikasi Si\_Bahenol (Sistem Informasi BPHTB Online) ..... 25

Gambar II.6 Aplikasi SiRetro (Sistem Informasi Retribusi Online) ..... 25

Gambar II.7 Aplikasi Digitasi Peta PBB..... 25

Gambar II.8 Aplikasi SILITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah) ..... 26

Gambar II.9 Aplikasi Gebyar Pajak Online ..... 26

Gambar II.10 Aplikasi SIMASET ..... 27

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bab I berisi:</b>                                                 |
| 1. <i>Cascading kinerja</i>                                          |
| 2. <i>Mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi</i> |
| 3. <i>Tugas, fungsi dan peta jabatan</i>                             |
| 4. <i>Isu-isu strategis</i>                                          |
| 5. <i>Dukungan sdm, sarana-prasarana dan anggaran</i>                |
| 6. <i>Tindak lanjut atas rekomendasi lke sakip tahun 2023</i>        |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD

dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

**1.1. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021–2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

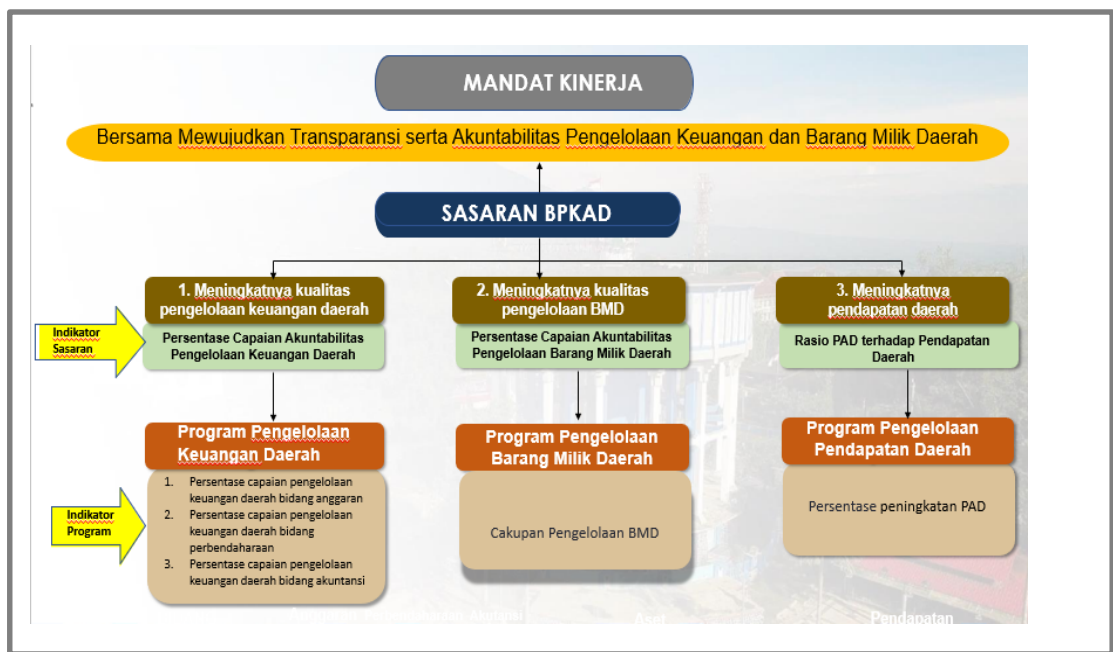


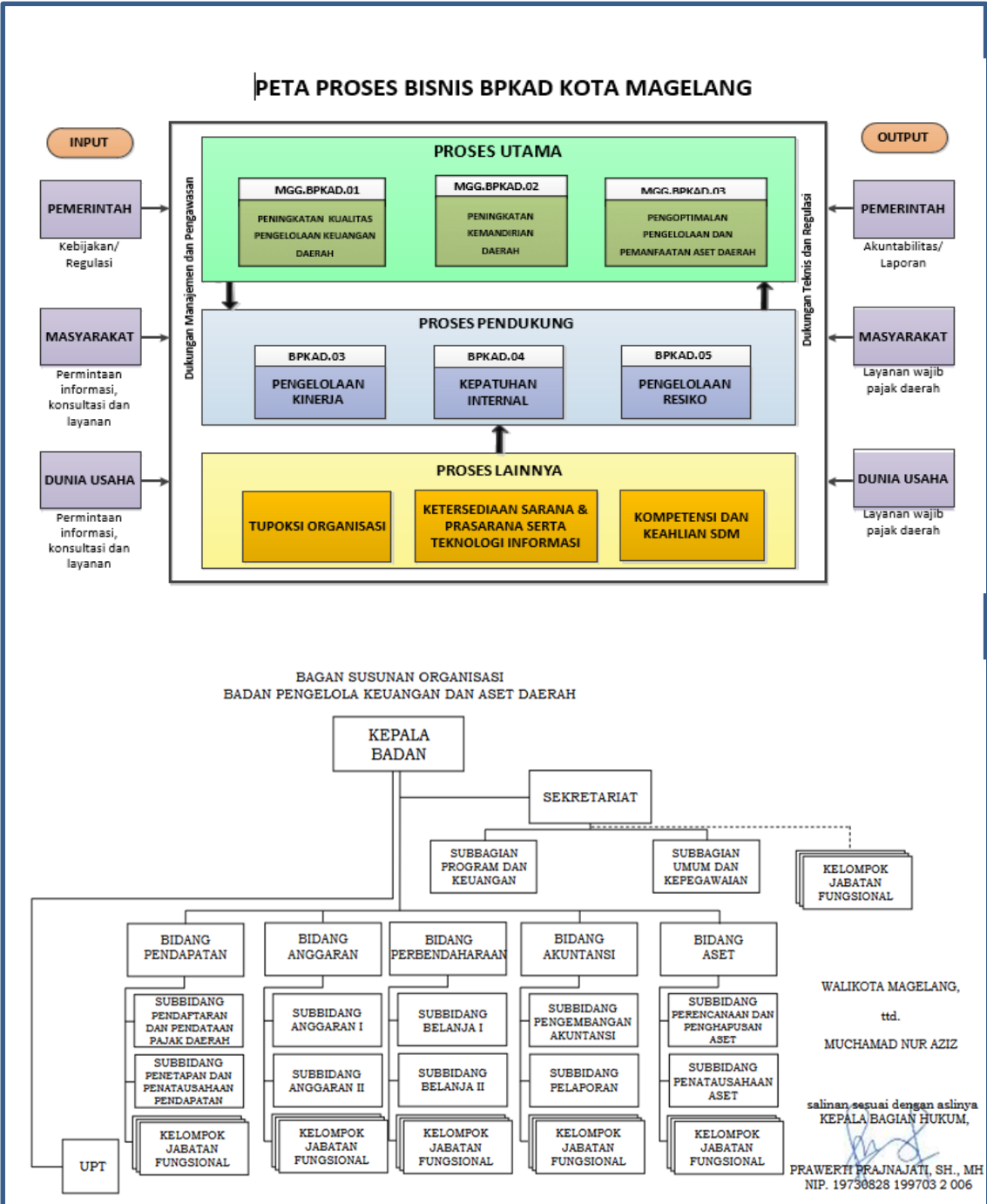
Sumber: Renstra Perubahan BPKAD 2021-2026

Gambar I. 1 Cascading Kinerja

## 1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Magelang sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :





Sumber : Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Gambar I. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur BPKAD

I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, BPKAD Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas yang terstruktur sesuai tugas dan fungsi para pejabatnya sebagai berikut :

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai fungsi:

- 1. perumusan kebijakan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- 4. pengendalian administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dibagi habis kedalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang, serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dibagi habis kedalam Jabatan Struktural dan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

| Jabatan Struktural                       | Jabatan Pelaksana                           | Jabatan Fungsional                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Kepala Badan                          |                                             |                                               |
| 2. Sekretaris                            | 1. Di bawah Sekretaris                      |                                               |
|                                          | 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian    |                                               |
| 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan    |                                               |
| 3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan | 1. Di bawah sub.Bagian Umum dan Kepegawaian |                                               |
|                                          | 2. Di bawah sub.Bagian Program dan Keuangan |                                               |
|                                          | 1. Bendahara Pengeluaran                    |                                               |
|                                          | 2. Analis Perencanaan                       |                                               |
| 3. Kepala Bidang Anggaran                | 1. Di bawah Kepala Bidang Anggaran          | 1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
|                                          | 1) Kepala Subbidang Anggaran I              |                                               |
|                                          | 2) Kepala Subbidang Anggaran II             |                                               |
|                                          | 3) Pranata Komputer Mahir                   |                                               |
|                                          | 2. Di bawah Subbidang Anggaran I            |                                               |
|                                          | 3. Di bawah Subbidang Anggaran II           |                                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>4. Kepala Bidang<br/>Perbendaharaan</p> | <p>4. Di bawah Analis<br/>Keuangan Pusat dan<br/>Daerah</p> <p>1. Di bawah Kepala Bidang<br/>Perbendaharaan</p> <p>1) Kepala Subbidang<br/>Belanja I</p> <p>2) Kepala Subbidang<br/>Belanja II</p> <p>3) Pengelola Data<br/>Belanja dan Laporan<br/>Keuangan</p> <p>4) Analis Sistem<br/>Informasi<br/>Pelaksanaan<br/>Anggaran</p> <p>5) Pengelola Data<br/>Belanja dan Laporan<br/>Keuangan</p> <p>3. Di bawah Subbidang<br/>Belanja I</p> <p>1) Pengelola Data<br/>Belanja dan Laporan<br/>Keuangan</p> <p>4. Di bawah Subbidang<br/>Belanja II</p> <p>1) Pengelola Data<br/>Belanja dan Laporan<br/>Keuangan</p> <p>2) Analis Sistem<br/>Informasi<br/>Pelaksanaan<br/>Anggaran</p> <p>5. Di bawah Analis<br/>Keuangan Pusat dan<br/>Daerah</p> | <p>1. Analis Keuangan Pusat<br/>dan Daerah Ahli Muda</p> |
| <p>5. Kepala Bidang Akuntansi</p>          | <p>1. Di bawah Kepala Bidang<br/>Akuntansi</p> <p>1) Kepala Subbidang<br/>Pengembangan<br/>Akuntansi</p> <p>2) Kepala Subbidang<br/>Pelaporan</p> <p>3) Pengolah Data Sistem<br/>Akuntansi</p> <p>4) Analis Konsolidasi<br/>Laporan Keuangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. Analis Keuangan Pusat<br/>dan Daerah Ahli Muda</p> |

|                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Di bawah Subbidang Pengembangan Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengolah Data Sistem Akuntansi</li> </ul> </li> <li>3. Di bawah Subbidang Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>3)Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran</li> </ul> </li> <li>4. Di bawah Analisis Keuangan Pusat dan Daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| 6. Kepala Bidang Pendapatan |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Di bawah Kepala Bidang Pendapatan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah</li> <li>2) Kepala Subbidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan</li> <li>3) Analisis Pendapatan Daerah</li> <li>4) Pengadministrasi Pajak Daerah (1)</li> <li>5) Pengadministrasi Pajak Daerah (2)</li> </ul> </li> <li>2. Di bawah Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis Pendapatan Daerah</li> </ul> </li> <li>3. Di bawah Subbidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Pajak Daerah (1)</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                   |
| 7. Kepala Bidang Aset       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Di bawah Kepala Bidang Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Dan Penghapusan Aset</li> <li>2) Kepala Subbidang Penatausahaan Aset</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda</li> </ul> |



#### 1.4. Isu-isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2021-2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
2. Optimalisasi penggalan potensi PAD untuk peningkatan pendapatan daerah;
3. Pengoptimalan manajemen aset agar aset daerah dapat terkelola secara baik.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang periode 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, arah kebijakan Pemerintah Daerah, dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 di antaranya dirincikan sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang belum mendekati potensi;
2. Belum optimalnya implementasi penggunaan ASB non fisik;
3. Kurang efektif dan efisiennya waktu dalam proses pencairan dana/belanja;
4. Penerapan aplikasi baru dalam penyusunan laporan keuangan, dimana pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan kemudian pada tahun 2024 menggunakan SIPD RI - Aklap (Akuntansi Pelaporan);
5. Personil Pengurus barang yang sering berganti;
6. Tugas pokok fungsi pengurus barang yang terkesan sebagai tugas sampingan;

- Pengurus barang kesulitan dalam mengidentifikasi BMD yang akan diusulkan penjualan;
- Pengusulan rencana kebutuhan BMD dari OPD tidak tepat waktu;
- Kurangnya kualitas standar satuan harga barang;
- Belum Optimalnya digitalisasi Pendapatan Asli Daerah.

### 1.5. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No | Jabatan                 | Formasi |             |     |        |     |     |          | Pegawai yang ada |             |     |        |     |     |          | Jenis Kelamin |    |
|----|-------------------------|---------|-------------|-----|--------|-----|-----|----------|------------------|-------------|-----|--------|-----|-----|----------|---------------|----|
|    |                         | J ml    | Kualifikasi |     |        |     |     |          | J ml             | Kualifikasi |     |        |     |     |          | L             | P  |
|    |                         |         | S 3         | S 2 | Si/ D4 | D 3 | D 1 | SMA/ SMK |                  | S 3         | S 2 | Si/ D4 | D 3 | D 1 | SMA/ SMK |               |    |
| 1  | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1       |             | V   |        |     |     |          | 1                |             | 1   |        |     |     |          | 1             |    |
| 2  | Jabatan Administrasi    |         |             |     |        |     |     |          |                  |             |     |        |     |     |          |               |    |
|    | 1. Administrator        | 6       |             | V   |        |     |     |          | 5                |             | 4   | 2      |     |     |          | -             | 4  |
|    | 2. Pengawas             | 12      |             | V   | V      | V   |     |          | 12               |             | 4   | 6      |     |     |          | 7             | 5  |
|    | 3. Pelaksana            | 38      |             | V   | V      | V   |     | V        | 10               |             | 2   | 7      | 4   | -   | 2        | 7             | 4  |
| 3  | Jabatan Fungsional      | 33      |             | V   |        |     |     |          | 8                |             | 1   | 3      |     |     |          | 5             | 3  |
|    | Jumlah                  | 90      |             |     |        |     |     |          | 36               | 0           | 12  | 18     | 4   | -   | 2        | 20            | 16 |

Sumber Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang Desember Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM BPKAD Kota Magelang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, dengan komposisi jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 orang (50%) , jenjang pendidikan S2 sebanyak 12 orang (33,33%), D3 sebanyak 4 orang (11,12%), dan SLTA sebanyak 2 orang (5,55%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; sedangkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 54 orang, terdiri dari 25 orang pejabat fungsional dan 29 pejabat administrasi. Dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan, terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan pada jabatan pelaksana, namun dari sisi kompetensi yang bersangkutan dapat

menjalankan tugas dengan baik dan kompeten. Pejabat pelaksana BPKAD Kota Magelang masih kurang 28 orang dari formasi yang seharusnya. Pelaksanaan tugas fungsi agar dapat tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan, dibantu oleh Tenaga Non PNS (Tenaga Harian Lepas) sesuai dengan kebutuhan/formasi yang belum terisi meskipun belum dapat terpenuhi semuanya.

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana

| No | Klasifikasi                 | Nama Bidang Barang                  | Jumlah Barang | Jumlah Harga dalam Rp |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | 2                           | 3                                   | 4             | 5                     |
| A. | Aset Tetap                  |                                     |               |                       |
| 1  | Peralatan dan mesin         | Alat besar                          | 7 Unit        | 351.437.900,00        |
|    |                             | Alat angkutan                       | 44 Unit       | 2.257.906.150,00      |
|    |                             | Alat bengkel dan alat ukur          | 6 Unit        | 50.011.750,00         |
|    |                             | Alat kantor dan rumah tangga        | 726 Unit      | 2.404.912.748,00      |
|    |                             | Alat studio komunikasi dan pemancar | 8 Unit        | 109.047.580,00        |
|    |                             | Alat kedokteran dan alat kesehatan  | 1 Unit        | 750.000,00            |
|    |                             | Alat komputer                       | 330 Unit      | 3.406.866.959,00      |
| 2  | Gedung dan bangunan         | Bangunan gedung                     | 7 Unit        | 4.463.180.406,00      |
|    |                             | Monumen                             | 6 Unit        | 59.864.412,00         |
| 3. | Jalan, jaringan dan irigasi | Bangunan air                        | 1 Unit        | 27.230.000,00         |
|    |                             | Instalasi                           | 5 Unit        | 137.196.230,00        |
|    |                             | Jaringan                            | 3 Unit        | 187.623.545,00        |
| 4. | Aset tetap lainnya          | Bahan perpustakaan                  | 301 Unit      | 83.206.000,00         |
| B. | Aset Lainnya                |                                     |               |                       |
| 1. | Aset Tidak Berwujud         | Software                            | 33 Unit       | 2.611.064.550,00      |
| C. | Aset Lain-Lain              |                                     |               |                       |
|    | Aset Lain-Lain              | Peralatan dan Mesin Rusak Berat     | 201 Unit      | 522.281.228,00        |
|    |                             | Gedung dan Bangunan Rusak Berat     | 2 Unit        | 33.037.081,00         |
|    |                             | Aset Tetap Lainnya Rusak Berat      | 2 Unit        | 1.580.000,00          |
|    | TOTAL                       |                                     | 1.679 unit    | 16.672.579.458        |

Sumber Data Neraca Perangkat Daerah per 31 Desember Tahun 2024 unaudited

Kendaraan dinas yang dimiliki BPKAD Kota Magelang terdiri dari 16 (enam belas) unit kendaraan dinas jabatan dan 22 (dua puluh dua) unit kendaraan operasional yang terbagi kendaraan operasional SKPD (Pengguna Barang) sebanyak

10 (sepuluh) unit dan kendaraan operasional milik Pengelola Barang sebanyak 12 (dua belas) unit.. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, ruang tunggu (lobi), ruang pelayanan pajak, ruang laktasi, perpustakaan, dan toilet umum serta akses bagi kaum disabilitas berupa ram jalan untuk kursi roda. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan peralatan mesin lainnya (PC, laptop, printer, peralatan TI lainnya) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja BPKAD Kota Magelang. Namun demikian, guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja, BPKAD Kota Magelang terus melakukan upaya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung yang baru.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

| Kode Rekening |   |    | Uraian                                            | Sebelum Perubahan (Rp)      | Setelah Perubahan (Rp)      | Bertambah/ Berkurang (Rp)   |
|---------------|---|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4             | 1 |    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>Rp73.494.568.000,00</b>  | <b>Rp79.908.391.500,00</b>  | <b>Rp6.413.823.500,00</b>   |
| 4             | 1 | 01 | Pajak Daerah                                      | Rp53.307.000.000,00         | Rp59.010.000.000,00         | <b>Rp5.703.000.000,00</b>   |
| 4             | 1 | 02 | Retribusi Daerah                                  | Rp0,00                      | Rp1.309.418.500,00          | <b>Rp1.309.418.500,00</b>   |
| 4             | 1 | 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp11.972.673.000,00         | Rp11.972.673.000,00         | <b>Rp0,00</b>               |
| 4             | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | Rp8.214.895.000,00          | Rp7.616.300.000,00          | <b>-Rp598.595.000,00</b>    |
| 4             | 2 |    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>Rp669.994.056.824,00</b> | <b>Rp654.020.139.805,00</b> | <b>-Rp15.973.917.019,00</b> |
| 4             | 2 | 01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | Rp612.314.840.824,00        | Rp594.490.412.805,00        | <b>-Rp17.824.428.019,00</b> |
| 4             | 2 | 02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | Rp57.679.216.000,00         | Rp59.529.727.000,00         | <b>Rp1.850.511.000,00</b>   |
| 5             | 1 |    | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>Rp14.094.970.790,00</b>  | <b>Rp16.931.027.528,00</b>  | <b>Rp2.836.056.738,00</b>   |
| 5             | 1 | 01 | Belanja Pegawai                                   | Rp9.036.610.557,00          | Rp12.091.798.498,00         | <b>Rp3.055.187.941,00</b>   |
| 5             | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa                           | Rp5.058.360.233,00          | Rp4.839.229.030,00          | <b>-Rp219.131.203,00</b>    |
| 5             | 2 |    | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>Rp302.447.314,00</b>     | <b>Rp403.580.714,00</b>     | <b>Rp101.133.400,00</b>     |
| 5             | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | Rp89.669.514,00             | Rp121.525.714,00            | <b>Rp31.856.200,00</b>      |
| 5             | 2 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya                        | Rp212.777.800,00            | Rp282.055.000,00            | <b>Rp69.277.200,00</b>      |
| 5             | 3 |    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>Rp5.000.000.000,00</b>   | <b>Rp1.987.166.000,00</b>   | <b>-Rp3.012.834.000,00</b>  |
| 5             | 3 | 01 | Belanja Tidak Terduga                             | Rp5.000.000.000,00          | Rp1.987.166.000,00          | <b>-Rp3.012.834.000,00</b>  |
| 6             | 1 |    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | <b>Rp71.893.890.238,00</b>  | <b>Rp110.462.848.049,00</b> | <b>Rp38.568.957.811,00</b>  |

|          |          |    |                                                  |                            |                            |                            |
|----------|----------|----|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6        | 1        | 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp62.305.986.338,00        | Rp94.567.136.149,00        | <b>Rp32.261.149.811,00</b> |
| 6        | 1        | 02 | Pencairan Dana Cadangan                          | Rp9.582.903.900,00         | Rp15.890.711.900,00        | <b>Rp6.307.808.000,00</b>  |
| 6        | 1        | 05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | Rp5.000.000,00             | Rp5.000.000,00             | <b>Rp0,00</b>              |
| <b>6</b> | <b>2</b> |    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>Rp12.000.000.000,00</b> | <b>Rp12.000.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>              |
| 6        | 2        | 01 | Pembentukan Dana Cadangan                        | Rp12.000.000.000,00        | Rp12.000.000.000,00        | <b>Rp0,00</b>              |
|          |          |    |                                                  | Rp846.779.933.166,00       | Rp875.713.153.596,00       | <b>Rp28.933.220.430,00</b> |

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Magelang sebesar Rp. 19.294.672.242,00 yang berasal dari APBD Perubahan Kota Magelang sebesar Rp 19.267.570.242,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 27.102.000,00. Bantuan Keuangan dari Provinsi ini digunakan untuk kegiatan pendistribusian SPIT (Surat Pemberitahuan dan Informasi Tagihan) PKB dan BBNKB. Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2024 Anggaran BPKAD Kota Magelang semula Rp. 19.397.418.104,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 19.294.672.242,00 atau berkurang Rp 102.745.862,00. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan salah satu upaya BPKAD Kota Magelang dalam peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja namun tetap mengutamakan efisiensi anggaran.

### 1.6. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor : 700.1.2.1/015.B.EV/600 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk ditindak lanjuti dan dipedomani pada pelaksanaan di tahun 2023, yaitu :

**Tabel I.4**  
**Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

| No. | Saran/Rekomendasi                                                                                                                                                             | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja.                                                                                                                                           | Berupaya melaksanakan Rekomendasi hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Selalu memperhatikan target indikator kinerja yang relevan/ <i>challenging</i> melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi atas target indikator kinerja yang diperjanjikan. | 1. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh sehingga dapat dipertahankan/ditingkatkan;<br>2. Melaksanakan rapat Monev Rencana Aksi tiap triwulan dengan memperhatikan setiap capaian indikator kinerja dari target-target yang diperjanjikan. Melakukan perubahan target indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diamati merupakan target yang <i>challenging</i> dari target semula sebesar 115,47% menjadi 146,85%. |

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda semakin pulihnya ekonomi Paska Covid-19, pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang semakin menunjukkan optimisme ke arah sebelum pandemi. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang maupun terhadap reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Namun demikian anggaran pada BPKAD Kota Magelang Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kerangka pendanaan Pemerintah Kota Magelang yang menerapkan basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority

Renstra BPKAD Kota Magelang yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021 – 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan/sub kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 2021-2026 Kota Magelang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 2021-2026 Kota Magelang. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

#### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran BPKAD yang terdapat pada Misi 3 RPJMD Kota Magelang yang diemban oleh Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis. Untuk BPKAD Kota Magelang sendiri mendukung pada tujuan 3 yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif. Sedangkan untuk sasaran daerah mendukung pada sasaran 12 yaitu : meningkatnya kualitas pelayanan publik, terciptanya birokrasi yang *kapabel*, serta terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra Perangkat Daerah. Berikut indikator dan target dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 sesuai tujuan dan sasarannya.

Tabel II.1  
Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Renstra)

| NO  | TUJUAN                                                             | SASARAN |                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                    | Baseline 2021 | TARGET KINERJA PADA TAHUN |         |         |         |         | Target Akhir Renstra |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
|     |                                                                    |         |                                                       |                                                                                      |               | 2022                      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |                      |
| (1) | (2)                                                                | (3)     |                                                       |                                                                                      |               | (5)                       | (6)     | (7)     | (8)     | (9)     |                      |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah |         |                                                       | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | 89,27%        | 89,76 %                   | 91,09 % | 92,03 % | 93,69 % | 93,87 % | 93,87%               |
|     |                                                                    | 1.1     | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah     | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 89,21%        | 89,76 %                   | 91,43 % | 91,43 % | 93,10 % | 93,10 % | 93,10%               |
|     |                                                                    | 1.2     | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 82,76%        | 89,77 %                   | 90,76 % | 92,64 % | 94,29 % | 94,64 % | 94,64%               |
| 2.  | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah                           |         |                                                       | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | 32,02%        | 36,16 %                   | 34,61 % | 35,64 % | 36,69 % | 36,69 % | 36,69%               |
|     |                                                                    | 2.1     | Meningkatnya Pendapatan Daerah                        | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                 | 23,82%        | 26,05 %                   | 25,25 % | 25,81 % | 26,37 % | 26,37 % | 26,37%               |

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2021-2026

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2  
Strategi dan arah Kebijakan

| VISI: MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA                                         |                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI III: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif           |                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| Tujuan                                                                         | Sasaran                                                     | Strategi                                                     | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah           | Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah       | 1. Peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan, serta administrasi penganggaran daerah.                                                                                                |
|                                                                                |                                                             |                                                              | 2. Peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola belanja daerah, dana transfer serta pembiayaan daerah.                                                                                    |
|                                                                                |                                                             |                                                              | 3.Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah.                                                                                                                                    |
|                                                                                | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan, manajemen pemanfaatan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah.                                                                                              |
| Meningkatnya kemandirian keuangan daerah                                       | Meningkatnya pendapatan daerah                              | Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah      | Peningkatan penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah, peningkatan pelayanan perpajakan, serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu. |

2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPKAD Kota Magelang tahun 2024 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

| Sasaran                                           | Kode Rekening     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Sebelum Perubahan (Rp.) | Setelah Perubahan (Rp.) | Bertambah/ Berkurang (Rp.) |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                         | 6.438.636.795           | 3.042.319.203,00        | - 3.396.317.592,00         |
|                                                   | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                                           | 1.001.504.015           | 616.565.315,00          | -384.938.700,00            |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                      | 64.127.900              | 55.706.100              | -8.421.800,00              |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                  | 40.337.800              | 25.282.600              | -15.055.200,00             |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                                                                              | 40.923.300              | 40.923.300              | 0,00                       |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                    | 21.728.700              | 5.423.900               | -16.304.800,00             |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                                              | 7.047.400               | 7.047.400               | 0,00                       |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                    | 7.075.500               | 5.173.000               | -1.902.500,00              |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | 194.026.315             | 206.458.515             | 12.432.200,00              |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | 187.816.100             | 167.457.000             | -20.359.100,00             |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                          | 77.406.200              | 103.093.500             | 25.687.300,00              |
|                                                   | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota                                                                                                                        | 361.014.800             | 0,00                    | -361.014.800,00            |
|                                                   | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                            | 195.953.600             | 179.542.700,00          | -16.410.900,00             |
|                                                   | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                       | 4.370.000               | 4.370.000               | 0,00                       |
|                                                   | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | 7.760.000               | 6.410.500               | -1.349.500,00              |
|                                                   | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                             | 8.289.300               | 6.211.500               | -2.077.800,00              |
|                                                   | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                  | 25.969.500              | 28.685.200              | 2.715.700,00               |
|                                                   | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 49.871.300              | 51.621.300              | 1.750.000,00               |

|                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                             |                      |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                              | 5.02.02.2.02.000<br>8 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                                     | 4.401.300            | 4.401.300               | 0,00                     |
|                                                              | 5.02.02.2.02.000<br>9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | 82.001.000           | 72.527.900              | -9.473.100,00            |
|                                                              | 5.02.02.2.02.001<br>0 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                               | 13.291.200           | 5.315.000               | -7.976.200,00            |
|                                                              | <b>5.02.02.2.03</b>   | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                   | <b>241.179.180</b>   | <b>259.045.188,00</b>   | <b>17.866.008,00</b>     |
|                                                              | 5.02.02.2.03.000<br>2 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 38.257.960           | 50.066.964              | -11.809.004,00           |
|                                                              | 5.02.02.2.03.000<br>4 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 71.030.160           | 78.087.164              | -7.057.004,00            |
|                                                              | 5.02.02.2.03.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 57.915.800           | 56.915.800              | 1.000.000,00             |
|                                                              | 5.02.02.2.03.000<br>9 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | 10.641.900           | 10.641.900              | 0,00                     |
|                                                              | 5.02.02.2.03.001<br>1 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | 63.333.360           | 63.333.360              | 0,00                     |
|                                                              | <b>5.02.02.2.04</b>   | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              | <b>5.000.000.000</b> | <b>1.987.166.000,00</b> | <b>-3.012.834.000,00</b> |
|                                                              | 5.02.02.2.04.000<br>9 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 5.000.000.000        | 1.987.166.000,00        | -3.012.834.000,00        |
| <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah</b> | <b>5.02.03</b>        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                              | <b>780.064.126</b>   | <b>814.966.750,00</b>   | <b>34.902.624,00</b>     |
|                                                              | <b>5.02.03.2.01</b>   | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                                      | <b>780.064.126</b>   | <b>814.966.750,00</b>   | <b>34.902.624,00</b>     |
|                                                              | 5.02.03.2.01.000<br>1 | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    | 19.241.200           | 17.507.200,00           | -1.734.000,00            |
|                                                              | 5.02.03.2.01.000<br>3 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                        | 18.614.900           | 18.614.900,00           | 0,00                     |
|                                                              | 5.02.03.2.01.000<br>5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                           | 190.355.340          | 212.426.356             | 22.071.016,00            |
|                                                              | 5.02.03.2.01.000<br>6 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                           | 56.495.400           | 33.525.400              | -22.970.000,00           |
|                                                              | 5.02.03.2.01.000<br>7 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                              | 266.906.600          | 169.288.200             | -97.618.400,00           |
|                                                              | 5.02.03.2.01.000<br>8 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                               | 48.875.900           | 112.735.900             | 63.860.000,00            |

|                                                                         |                       |                                                                                                                            |                      |                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                                         | 5.02.03.2.01.001<br>0 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                   | 71.925.866           | 75.105.866                   | 3.180.000,00                       |
|                                                                         | 5.02.03.2.01.001<br>2 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                     | 80.839.320           | 148.953.328                  | 68.114.008,00                      |
|                                                                         | 5.02.03.2.01.001<br>3 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                        | 26.809.600           | 26.809.600                   | 0,00                               |
| <b>Meningkatny<br/>a pendapatan<br/>daerah</b>                          | <b>5.02.04</b>        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                               | <b>2.131.020.801</b> | <b>2.127.883.276,0<br/>0</b> | <b>-3.137.525,00</b>               |
|                                                                         | <b>5.02.04.2.01</b>   | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                              | <b>2.131.020.801</b> | <b>2.127.883.276,0<br/>0</b> | <b>-3.137.525,00</b>               |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.000<br>1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                       | 1.572.497.401        | 1.603.626.246                | 31.128.845,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.000<br>3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                       | 17.640.300           | 13.627.400                   | -4.012.900,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.000<br>6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                            | 60.887.100           | 76.222.120                   | 15.335.020,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.000<br>7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 19a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 19.788.100           | 16.650.680                   | -3.137.420,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.000<br>8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                               | 64.234.700           | 57.332.350                   | -6.902.350,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.001<br>0 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                      | 7.878.900            | 6.917.400                    | -961.500,00                        |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.001<br>1 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                     | 217.553.400          | 234.093.630                  | 16.540.230,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.001<br>3 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                      | 79.605.300           | 34.477.850                   | -45.127.450,00                     |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.001<br>4 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                     | 57.508.600           | 51.508.600                   | -6.000.000,00                      |
|                                                                         | 5.02.04.2.01.001<br>5 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                | 33.427.000           | 33.427.000                   | 0,00                               |
| <b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b> |                       |                                                                                                                            | <b>9.349.721.722</b> | <b>5.985.169.229</b>         | <b>-<br/>3.364.552.493,0<br/>0</b> |

Tabel II.3.2 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                 | Anggaran (Rp)  |                | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|    |                                                                  | Penetapan      | Perubahan      |                         |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 10.047.696.382 | 13.336.605.013 | 3.288.908.631           |
| 2  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.477.200     | 19.588.400     | -5.888.800              |
| 3  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 6.465.000      | 5.356.400      | -1.108.600              |
| 4  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 2.136.700      | 1.933.700      | -203.000                |
| 5  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 2.666.100      | 1.816.800      | -849.300                |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 2.434.700      | 1.514.100      | -920.600                |

|    |                                                                                                                     |               |                |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 7  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 2.440.500     | 1.412.900      | -1.027.600    |
| 8  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 9.334.200     | 7.554.500      | -1.779.700    |
| 9  | <b>Administrasi Keuangan Perangfiat Daerah</b>                                                                      | 8.187.012.156 | 11.250.651.043 | 3.063.638.887 |
| 10 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 8.126.228.836 | 11.184.658.415 | 3.058.429.579 |
| 11 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 9.966.600     | 8.456.400      | -1.510.200    |
| 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 50.816.720    | 57.536.228     | 6.719.508     |
| 13 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangfiat Daerah</b>                                                                   | 1.481.900     | 1.481.900      | 0             |
| 14 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                   | 1.481.900     | 1.481.900      | 0             |
| 15 | <b>Administrasi Umum Perangfiat Daerah</b>                                                                          | 111.253.700   | 140.141.400    | 28.887.700    |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 4.489.900     | 3.972.800      | -517.100      |
| 17 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 17.097.200    | 17.097.200     | 0             |
| 18 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 7.166.300     | 6.315.100      | -851.200      |
| 19 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 4.200.000     | 4.200.000      | 0             |
| 20 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 4.896.300     | 4.896.300      | 0             |
| 21 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 10.868.000    | 10.868.000     | 0             |
| 22 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 62.536.000    | 92.792.000     | 30.256.000    |
| 23 | <b>Pengadaan Barang Milifi Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | 37.051.114    | 121.525.714    | 84.474.600    |
| 24 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 37.051.114    | 121.525.714    | 84.474.600    |
| 25 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | 451.302.312   | 485.562.322    | 34.260.010    |
| 26 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 52.813.460    | 52.813.460     | 0             |
| 27 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 318.176.992   | 332.186.512    | 14.009.520    |
| 28 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 80.311.860    | 100.562.350    | 20.250.490    |
| 29 | <b>Pemeliharaan Barang Milifi Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | 1.234.118.000 | 1.317.654.234  | 83.536.234    |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 224.360.750   | 224.360.750    | 0             |

|    |                                                                                                                 |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 292.372.460 | 257.798.864 | -34.573.596 |
| 32 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 31.012.000  | 49.512.000  | 18.500.000  |
| 33 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | 122.700.000 | 192.700.000 | 70.000.000  |
| 34 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 563.672.790 | 593.282.620 | 29.609.830  |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pada bulan Januari Tahun 2024 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4.1  
Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA |                                                                                      | SATUAN | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                  | 3                 |                                                                                      | 4      | 5      |
| 1. | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | 1.1               | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | %      | 92,03  |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Daerah                                    | 2.1               | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | %      | 35,64  |

|    |                                                          |     |                                                                  |   |       |
|----|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 3. | Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas | 3.1 | Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas           | % | 100   |
| 4. | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah        | 4.1 | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah     | % | 91,43 |
| 5. | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah    | 5.1 | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 92,64 |
| 6. | Meningkatnya Pendapatan daerah                           | 6.1 | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah                             | % | 25,81 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat dukungan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan dengan rincian program sebagai berikut :

Tabel II.4.2  
Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET   | ANGGARAN       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5              |
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan | 100 %    | 10.047.696.382 |
| 2   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran                                                                                                                                                                                                                                        | 100%     | 6.438.636.795  |
|     |                                                             | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan                                                                                                                                                                                                                                  | 100%     |                |
|     |                                                             | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi                                                                                                                                                                                                                                       | 100%     |                |
| 3   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                               | 85.71 %  | 780.064.126    |
| 4   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 115,47 % | 2.131.020.801  |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran, serta target indikator kinerja yang relevan/challenging);
- 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan review/perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan :

- 1. Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/realisasi pencapaian target indikator kinerja yang relevan/challenging;
- 2. Adanya perubahan alokasi anggaran sesuai penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2024.

Adapun perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota MagelangTahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA |                                                                                      | SATUAN | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                  | 3                 |                                                                                      | 4      | 5      |
| 1. | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | 1.1               | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | %      | 99,68  |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Daerah                                    | 2.1               | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | %      | 46,10  |
| 3. | Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas           | 3.1               | Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas                               | %      | 100    |
| 4. | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                  | 4.1               | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | %      | 100    |
| 5. | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah              | 5.1               | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | %      | 99,55  |
| 6. | Meningkatnya Pendapatan daerah                                     | 6.1               | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                 | %      | 33,81  |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran perubahan dengan rincian program sebagai berikut :

Tabel II.4.4  
Perubahan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2024

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET   | ANGGARAN       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5              |
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan | 100 %    | 13.336.605.013 |
| 2   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran                                                                                                                                                                                                                                        | 100%     | 3.055.153.203  |
|     |                                                             | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan                                                                                                                                                                                                                                  | 100%     |                |
|     |                                                             | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi                                                                                                                                                                                                                                       | 100%     |                |
| 3   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                               | 85.71 %  | 814.966.750    |
| 4   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 146.85 % | 2.087.947.276  |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Tahun 2024

Keterangan tambahan :

1. Terdapat penyesuaian target kinerja pada indikator sasaran dikarenakan hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja semula yang berdasarkan target tahunan Renstra, sedangkan capaian akhir tahun sebelumnya lebih tinggi dari target tahunan Renstra, sehingga target kinerja yang dipakai adalah target yang tertinggi (*challenging*). Berikut penyesuaian/perubahan target indikator kinerja dimaksud :
  - a. Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 92,03%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 99,68%.
  - b. Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 35,64%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 46,10%.

- c. Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 91,43%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 100%.
  - d. Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 92,64%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 99,55%.
  - e. Indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 25,81%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 33,81%.
2. Sedangkan untuk volume anggaran juga berubah yaitu berkurang sebesar 0,39%, hal ini dalam rangka melaksanakan amanat dari pemerintah pusat yang berupa efisiensi anggaran.
  3. Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap hasil/realisasi pencapaian target indikator program, terdapat pula 1 (satu) indikator yang challenging yaitu indikator Persentase Peningkatan PAD yang merupakan indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melekat pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pendapatan dengan Kepala BPKAD Kota Magelang. Target pada penetapan Perjanjian Kinerja adalah 115,47%, dan dikarenakan realisasi pada tahun 2023 mencapai sebesar 151,57% maka dirubahlah target pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 menjadi 146,85%.
  4. Mengelola Belanja Tidak Terduga yang terdapat pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
  5. Pada pergeseran anggaran setelah perubahan mengelola dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 27.102.000,00. Bantuan Keuangan dari Provinsi ini digunakan untuk kegiatan pendistribusian SPIT (Surat Pemberitahuan dan Informasi Tagihan) PKB dan BBNKB.

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Rapotan di aplikasi Smart Magelang : <https://smart.magelangkota.go.id/>

Rapor SKPD

Rapor SKPD > Data

Rapor Triwulan Perangkat Daerah

Tahun

2024

Triwulan

TW4

Perangkat Daerah (OPD/SKPD/Unit)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rapor

Show

10

entries

Search:

| No | Aspek            | Nilai Dasar | Klasifikasi | Bobot | Nilai Akhir | Unit Lead                                | Catatan                                                                                             | Rekomendasi                                                                            | Tindak Lanjut | Bukti Dukung | Catatan Verif |            |
|----|------------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1  | Capaian Kinerja  | 100.00      | 5           | 35    | 35.00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     | lengkapi faktor pendorong / penghambat (jika ada)                                                   | -                                                                                      | Siap          |              | -             | Verifikasi |
| 2  | Serapan Keuangan | 73.40       | 3           | 20    | 14.68       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | capaian keuangan masih kurang                                                                       | tahun depan untuk lebih ditingkatkan                                                   | Siap          |              | terimakasih   | Verifikasi |
| 3  | Realisasi Fisik  | 100.00      |             | 15    | 15.00       | SEKRETARIAT DAERAH                       | Capaian sudah baik                                                                                  | Mohon untuk diertahankan di tahun 2025                                                 | Siap          |              | -             | Verifikasi |
| 4  | Pengawasan       | 80.00       |             | 10    | 8.00        | INSPEKTORAT                              | Terimakasih sudah ditindaklanjuti                                                                   | Tingkatkan tatakelola yang baik                                                        | Siap          |              | terimakasih   | Verifikasi |
| 5  | P3DN             | 92.22       | 5           | 10    | 9.22        | SEKRETARIAT DAERAH                       | Capaian sudah bagus, melampaui target kota namun belum sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan | Tingkatkan untuk tahun berikutnya                                                      | Siap          |              | -             | Verifikasi |
| 6  | Inovasi          | 100.00      | 3           | 10    | 10.00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     | Siapkan inovasi 2025 dan bukti dukunginya                                                           | Perhatikan bukti dukung regulasi inovasi, tim pengelola dan tim pelaksana inovasi 2025 | Siap          |              | terimakasih   | Verifikasi |

Total Nilai: 91.90

Download Rapor

Gambar II.1 Aplikasi Smart Magelang

2. Instagram BPKAD Kota Magelang

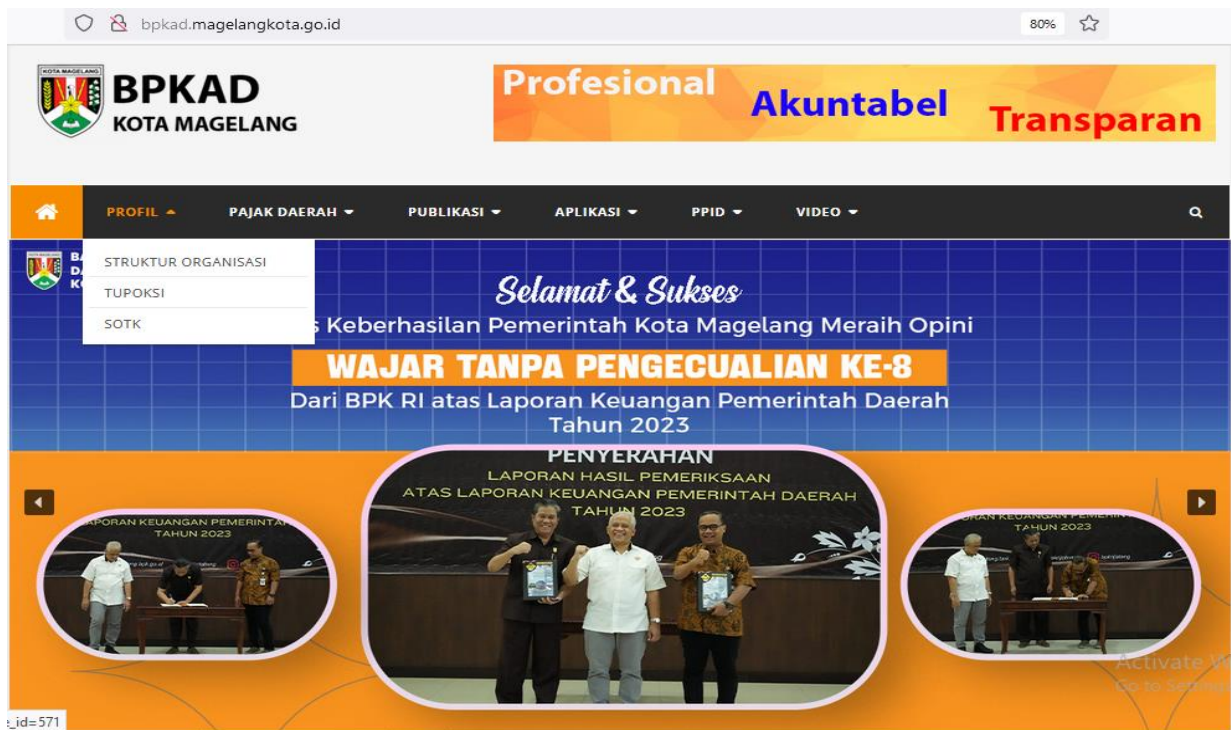
Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi 26a kat, BPKAD Kota Magelang juga memanfaatkan platform Instagram pada akun @bpkadkotamagelang. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan BPKAD Kota Magelang serta informasi-informasi umum lainnya. Profil Instagram BPKAD Kota Magelang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.2 Instagram BPKAD Kota Magelang

3. Website BPKAD Kota Magelang

Berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, dan lain sebagainya. Bisa diperoleh melalui alamat : <http://bpkad.magelangkota.go.id/>



Gambar II.3 Website BPKAD Kota Magelang

4. SIMPAD\_Pak Dewo\_e SPTPD, Sistem yang digunakan untuk pelayanan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan.



Gambar II.4 Aplikasi Pak Dewo (Pajak Daerah Online)

5. eBPHTP\_Sibahenol\_BPHTB Online, Sistem yang digunakan untuk pelayanan BPHTB secara online mulai dari pendaftaran, pembayaran sampai dengan proses validasi SSPD BPHTB.



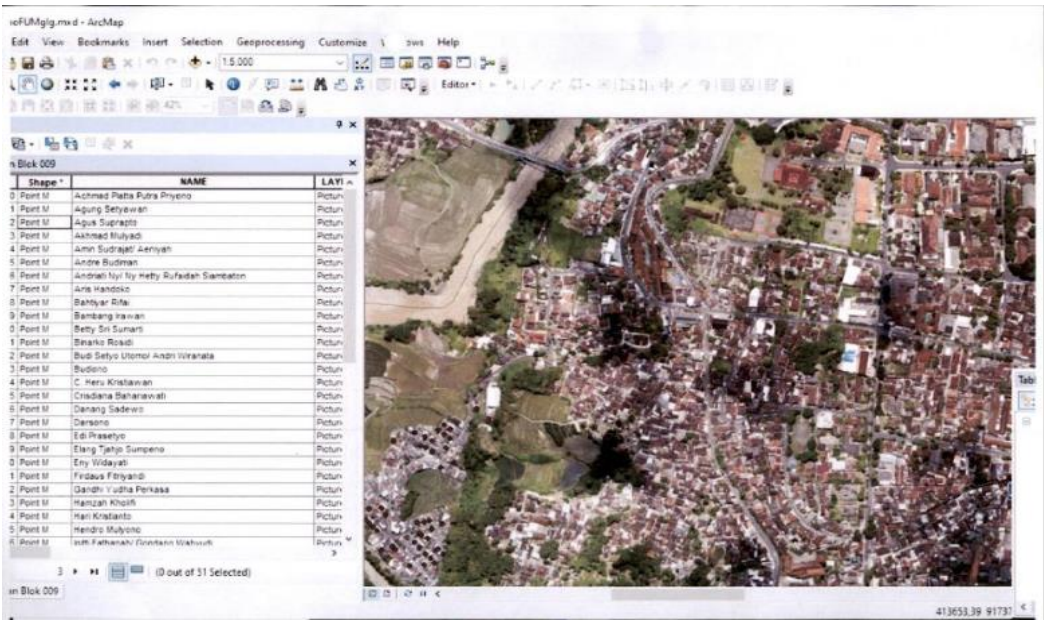
Gambar II.5 Aplikasi Si\_Bahenol (Sistem Informasi BPHTB Online)

6. Retribusi Online\_SiRetro, Sistem yang digunakan untuk pelayanan retribusi daerah mulai dari penerbitan SKRD, pembayaran dan pelaporan. SIRETRO digunakan oleh seluruh OPD Penghasil Pendapatan.



Gambar II.6 Aplikasi SiRetro (Sistem Informasi Retribusi Online)

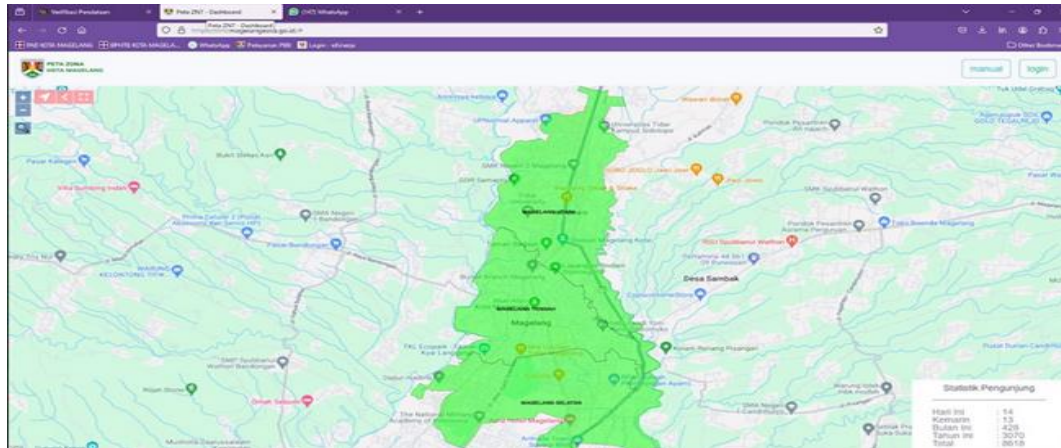
7. SMART MAPS\_Digitasi Peta PBB



Gambar II.7 Aplikasi Digitasi Peta PBB

## 8. SILITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah)

Dengan Sistem Informasi Zona Nilai Tanah (SI-LITA), masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan nilai jual tanah diseluruh Kota Magelang hanya dengan mengakses <http://znt.magelangkota.go.id> tanpa harus LOGIN dan langsung bisa mengetahui nilai tanah.



Gambar II.8 Aplikasi SILITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah)

## 9. SIAP GRAK (Sistem Aplikasi Gebyar Pajak)

Merupakan aplikasi guna memberikan keterbukaan informasi dalam pemungutan pajak daerah bahwa semua pajak yang dibayarkan oleh masyarakat/wajib pajak langsung masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah melalui berbagai kanal pembayaran seperti BIMA Mobile, QRIS, Alfamart-Indomart, Kantor Pos dan berbagai marketplace



Gambar II.9 Aplikasi Gebyar Pajak Online

10. SIM ASET

Sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah.



Gambar II.10 Aplikasi SIMASET

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| BAB III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| AKUNTABILITAS KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara : |                        |
| 1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :                                                                                                                                                                                          |                        |
| Tabel III.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Skala Nilai Peringkat Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kategori/Interprestasi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sangat Tinggi          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tinggi                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sedang                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rendah                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sangat Rendah          |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024;
- 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel III.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Kategori/Interprestasi | Rata-rata % Capaian |
|-----|------------------------|---------------------|
| 1   | Sangat Tinggi          | 91 ≤ 100            |
| 2   | Tinggi                 | 76 ≤ 90             |
| 3   | Sedang                 | 66 ≤ 75             |
| 4   | Rendah                 | 51 ≤ 65             |
| 5   | Sangat Rendah          | ≤ 50                |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi berikut adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023.

Tabel III.2  
Capaian Kinerja Tahun 2024

| No | Tujuan/<br>Sasaran                                                                              | Indikator<br>Kinerja                                                                                      | Baseline<br>%<br>Capaian<br>(2021) | 2022       |             |              | 2023       |            |              | 2024       |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | Target     | Realisasi   | %<br>Capaian | Target     | Realisasi  | %<br>Capaian | Target     | Realisasi  | %<br>Capaian |
| 1  | Tujuan 1 :<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan<br>Barang Milik<br>Daerah | Persentase<br>Capaian<br>Akuntabilitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah dan<br>Barang Milik<br>Daerah | 105,73%                            | 89,76<br>% | 102,4<br>5% | 114,14<br>%  | 91,09<br>% | 99,68<br>% | 109,43<br>%  | 99,68<br>% | 99,68<br>% | 100%         |
|    | Sasaran 1.1 :<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah                  | Persentase<br>Capaian<br>Akuntabilitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah                               | 111,40%                            | 89,76<br>% | 100<br>%    | 111,41<br>%  | 91,43<br>% | 100%       | 109,37<br>%  | 100%       | 100%       | 100%         |
|    | Sasaran 1.2 :<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah              | Persentase<br>Capaian<br>Akuntabilitas<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                           | 103,59%                            | 89,77<br>% | 104,9<br>1% | 116,87<br>%  | 90,76<br>% | 99,35<br>% | 109,46<br>%  | 99,55<br>% | 99,64<br>% | 100,09<br>%  |
| 2  | Tujuan 2 :<br>Meningkatnya<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah                                 | Rasio<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah                                                                | 125,55%                            | 36,16<br>% | 54,03<br>%  | 149,42<br>%  | 34,61<br>% | 45,10<br>% | 130,31<br>%  | 46,10<br>% | 50,44<br>% | 109,41<br>%  |
|    | Sasaran 2.1 :<br>Meningkatnya<br>Pendapatan<br>daerah                                           | Rasio PAD<br>terhadap<br>pendapatan<br>daerah                                                             | 100%                               | 26,05<br>% | 38,37<br>%  | 147,29<br>%  | 25,25<br>% | 33,51<br>% | 132,72<br>%  | 33,81<br>% | 34,05<br>% | 100,71<br>%  |

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai dengan hasil Monev Indikator Kinerja Utama yaitu indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Magelang, diperoleh 5 (lima) indikator dengan hasil capaian Sangat Tinggi atau sebesar 100% bahkan lebih. Dengan demikian keseluruhan jumlah Indikator Kinerja Utama yang diampu BPKAD Kota Magelang mencapai predikat kinerja Sangat Tinggi seluruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kota Magelang telah memiliki kinerja yang sangat baik dalam mencapai target-targetnya selama tahun 2024.

Faktor Pendukung keberhasilan :

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), ketepatan penetapan sasaran perencanaan pembangunan serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama maka rumusan indikator dan formulasi perhitungan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.3  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran                                                            | Indikator                                                                            | Meta Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | I = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah<br>II = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah<br><br><b>Rumus = (I+II)/2 x 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                  | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu<br>B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan<br>C. Presentase Pelaporan Keuangan sesuai SAP<br><br><b>Rumus = (A+B+C)/3 x 100%</b><br><br>DO A :<br>Jumlah rancangan dokumen(RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah rancangan dokumen penganggaran (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) x 100%<br><br>DO B :<br>Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah SPM yang diterima x 100%<br><br>DO C :<br>Jumlah Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah Laporan Keuangan seluruh OPD x 100 |

|   |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | <p>Persentase yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang merupakan komposit dari nilai :</p> <p>a. Persentase BMD yang dimanfaatkan</p> <p>b. Persentase OPD dengan BMD yang sesuai Standar</p> <p>c. Persentase Pengamanan BMD</p> <p>d. Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas</p> <p>e. Persentase BMD yang dipindahtanggankan</p> <p><b>Rumus = (a+b+c+d+e)/5 x 100%</b></p> |
| 4 | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah              | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                | <p>Jumlah Anggaran PAD dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima dari transfer pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer provinsi serta Pinjaman Daerah</p> <p>A. Anggaran PAD<br/>B. Anggaran Transfer Pusat<br/>C. Anggaran Transfer Provinsi<br/>D. Anggaran Pinjaman</p> <p><math display="block">DO = \frac{A}{(B + C + D)} \times 100\%</math></p>                                     |
| 5 | Meningkatnya Pendapatan daerah                        | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah                             | <p>Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah</p> <p>a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah<br/>b. Jumlah Pendapatan Daerah</p> <p><b>Rumus = (a/b) x 100%</b></p>                                                                                                                                                                                    |

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Sehingga peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel III.4.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Sasaran                                           | Indikator Sasaran                                            | Realisasi 2023 (%) | Tahun 2024 |               |             | Target Akhir Renstra (%) | Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                              |                    | Target (%) | Realisasi (%) | % Realisasi |                          |                                                          |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 100                | 100        | 100           | 100         | 93.10                    | 107.41                                                   |

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu BPKAD Kota Magelang menetapkan indikator kinerja untuk sasaran ini adalah Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator yaitu Persentase dokumen penganggaran daerah yang tepat waktu, Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan, dan Pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan cerminan dari proses pengelolaan keuangan itu sendiri. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, yang merupakan hasil komposit dari realisasi masing-masing indikator pembentuknya yang bernilai 100% pula. Berikut rincian penjelasannya :

- Terealisasi 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai).

- Realisasi tahun 2024 sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Namun apabila dilihat secara capaian realisasi dibandingkan target pada penetapan Perjanjian Kinerja meningkat.
- Capaian target kinerja pada tahun 2024 melampaui cerminan capaian tahun akhir Renstra yaitu sebesar 107,41%.

### 3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Guna mencapai sasaran maka keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut diakomodir dalam indikator kinerjanya yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan komposit dari indikator rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD, Rasio pensertifikatan tanah, Persentase pengumpulan usulan RKBMD secara benar dan tepat waktu, Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu.

Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,64% menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 99,35%, serta melampaui pula terhadap cerminan capaian tahun akhir Renstra yang sebesar 94,64%.

Tabel III.4.2  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

| No | Sasaran                                               | Indikator Sasaran                                                | Realisasi 2023 (%) | Tahun 2024 |               |             | Target Akhir Renstra (%) | Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                  |                    | Target (%) | Realisasi (%) | % Realisasi |                          |                                                          |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 99,35              | 99,55      | 99,64         | 100,09      | 94,64                    | 105,28                                                   |

Hasil dari realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Magelang telah berjalan dengan baik.

3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan daerah

Sasaran strategis berikutnya adalah berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dengan indikator kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dengan target kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada adalah 33,81%, dan terealisasi sebesar 34,05%, dengan capaian kinerja sebesar 100,71%. Realisasi pada tahun 2024 ini pun telah melampaui apabila dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra yang sebesar 26,37%. Adapun definisi operasional dari indikator ini adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan dari Pendapatan Daerah, di mana pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 342.654.483.171,00 sedangkan untuk Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.006.213.506.909,00.

Tabel III.4.3  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

| No | Sasaran                        | Indikator Sasaran                    | Realisasi 2023 (%) | Tahun 2024 |               |             | Target Akhir Renstra (%) | Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                |                                      |                    | Target (%) | Realisasi (%) | % Realisasi |                          |                                                          |
| 1. | Meningkatnya pendapatan daerah | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 33,51              | 33,81      | 34,05         | 100,71      | 26,37                    | 129,12                                                   |

Adapun tujuan dari menggunakan indikator rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap pendapatan daerah pada pengukuran kinerja adalah untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Dalam mencapai sasaran strategis ini pun tak lepas dari beberapa faktor pendorong dan penghambatnya.

Faktor Pendorong keberhasilan :

- a. Terdapat pengembangan beberapa aplikasi pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah, di antaranya yaitu SIAP GRAK (Sistem Aplikasi Gebyar Pajak), Digitasi Peta,

SIMPAD (Sistem Informasi PAD), SIRETRO (Sistem Retribusi Online), dan SISMIOP berbasis Web.

- b. Kontinuitas Penagihan Piutang Pajak.
- c. Pelaksanaan kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu serta bertujuan sebagai stimulant dalam penerimaan pajak daerah tahun 2024.

Sedangkan untuk faktor penghambat, di antaranya adalah :

- a. Terbatasnya fungsi-fungsi dalam pemungutan pajak seperti fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan dan fungsi pengawasan dalam tata kelola perpajakan belum berjalan secara optimal;
- b. Pelaksanaan penegakan perda terkait dengan pelanggaran Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak ada efek jera dari wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Pajak Daerah;
- c. Reaksi adanya kata boikot terhadap beberapa branding yang menyangkut isu Israel dan Palestina membawa dampak terhadap penurunan penerimaan dari pajak restoran.

Adapun manfaat dari penggunaan indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah adalah dapat memberikan informasi tentang:

- a. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber-sumber pendapatan dari luar daerah.
- c. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga diiharapkan pula dengan menggunakan indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerjanya dalam menghasilkan pendapatan dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan daerah.

Sementara itu untuk pencapaian sasaran-sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program penunjang urusan yang ada pada setiap perangkat daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan pemetaan dari nomenklatur program di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

3.1.4. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator pelaksanaan program ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.5.1  
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan      |                                                            |                                                                                                             | Idikator Kinerja                                                                         | Tar get | Satuan  | Realisasi | % Capaian | Anggaran    |             |           |                   |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
|    |                                     |                                                            |                                                                                                             |                                                                                          |         |         |           |           | Pagu        | Realisasi   | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1  | 2                                   |                                                            |                                                                                                             | 3                                                                                        | 4       | 5       | 6         | 7         | 8           | 9           | 10        | 11                |
|    | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |                                                            |                                                                                                             |                                                                                          |         |         |           |           |             |             |           |                   |
|    |                                     | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |                                                                                                             | Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran                           | 100     | %       | 100       | 100.00%   | 616,565,315 | 548,441,378 | 88.95%    | 1.12              |
|    |                                     |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                 | 2       | dokumen | 2         | 100.00%   | 55,706,100  | 52,166,750  | 93.65%    | 1.07              |
|    |                                     |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                             | 2       | dokumen | 2         | 100.00%   | 25,282,600  | 23,445,250  | 92.73%    | 1.08              |
|    |                                     |                                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                              | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                        | 28      | dokumen | 28        | 100.00%   | 40,923,300  | 37,996,500  | 92.85%    | 1.08              |
|    |                                     |                                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                              | 28      | dokumen | 28        | 100.00%   | 5,423,900   | 4,378,000   | 80.72%    | 1.24              |
|    |                                     |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2       | dokumen | 2         | 100.00%   | 206,458,515 | 167,133,378 | 80.95%    | 1.24              |

|  |  |                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |     |         |     |         |             |             |        |      |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-------------|-------------|--------|------|
|  |  |                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD            | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                     | 2   | dokumen | 2   | 100.00% | 167,457,000 | 151,814,800 | 90.66% | 1.10 |
|  |  |                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                          | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 103,093,500 | 99,733,200  | 96.74% | 1.03 |
|  |  | 9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |                                                                                                                                            | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan                                                                                             | 100 | %       | 100 | 100.00% | 179,542,700 | 175,402,550 | 97.69% | 1.02 |
|  |  |                                                              | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                             | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                | 28  | dokumen | 28  | 100.00% | 7,047,400   | 6,641,000   | 94.23% | 1.06 |
|  |  |                                                              | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                   | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                | 28  | dokumen | 28  | 100.00% | 5,173,000   | 5,132,500   | 99.22% | 1.01 |
|  |  |                                                              | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                      | 28  | dokumen | 28  | 100.00% | 4,370,000   | 3,970,000   | 90.85% | 1.10 |
|  |  |                                                              | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            | 112 | dokumen | 112 | 100.00% | 6,410,500   | 6,294,500   | 98.19% | 1.02 |
|  |  |                                                              | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | 12  | dokumen | 12  | 100.00% | 6,211,500   | 6,066,000   | 97.66% | 1.02 |
|  |  |                                                              | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 102 | dokumen | 102 | 100.00% | 28,685,200  | 27,815,800  | 96.97% | 1.03 |

|  |  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |     |         |             |             |        |      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-------------|-------------|--------|------|
|  |  |                                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 22  | laporan | 22  | 100.00% | 51,621,300  | 50,558,250  | 97.94% | 1.02 |
|  |  |                                                                                 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | dokumen | 5   | 100.00% | 4,401,300   | 4,116,000   | 93.52% | 1.07 |
|  |  |                                                                                 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | 12  | dokumen | 12  | 100.00% | 72,527,900  | 71,290,000  | 98.29% | 1.02 |
|  |  |                                                                                 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 5,315,000   | 5,292,000   | 99.57% | 1.00 |
|  |  | 10. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |                                                                                                                                                                                            | Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 | %       | 100 | 100.00% | 259,045,188 | 256,235,528 | 98.92% | 1.01 |

|  |  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |     |         |     |         |               |             |         |      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|---------------|-------------|---------|------|
|  |  |                                                                      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     | 102 | dokumen | 102 | 100.00% | 50,066,964    | 50,066,284  | 100.00% | 1.00 |
|  |  |                                                                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 336 | laporan | 336 | 100.00% | 78,087,164    | 77,557,034  | 99.32%  | 1.01 |
|  |  |                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2   | dokumen | 2   | 100.00% | 56,915,800    | 55,550,900  | 97.60%  | 1.02 |
|  |  |                                                                      | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 10,641,900    | 10,286,700  | 96.66%  | 1.03 |
|  |  |                                                                      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 204 | orang   | 204 | 100.00% | 63,333,360    | 62,774,610  | 99.12%  | 1.01 |
|  |  | 11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                                               | 100 | %       | 100 | 100.00% | 1,987,166,000 | 969,996,500 | 48.81%  | 2.05 |
|  |  |                                                                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               | 12  | laporan | 12  | 100.00% | 1,987,166,000 | 969,996,500 | 48.81%  | 2.05 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik, yang berarti sangat mendukung terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu hasil dari pelaksanaan kegiatan yang baik ini juga bisa memenuhi target outputnya secara tepat waktu.

Demikian pula dengan pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan daerah. Meski demikian masih diperlukannya sinergisitas yang lebih antara proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah terutama melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan sistem dari pemerintah pusat (Kementrian Dalam Negeri). Di mana untuk tahun 2024 adalah merupakan tahun pertama dalam mengimplementasikan SIPD Penatausahaan Keuangan serta SIPD Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) yang notabene dalam perjalanannya masih terdapat beberapa kendala. Ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Hasil dari Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel III.5.1 di atas menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Magelang telah berjalan dengan baik.

Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Melaksanakan belanja daerah sesuai dengan rencana kebutuhan serta berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Kepatuhan serta pemahaman para Pejabat Pengelola Keuangan di setiap OPD terhadap regulasi yang berlaku.
- c. Kebijakan Pengajuan pembayaran belanja modal atau barang inventaris dilampiri dengan surat pernyataan pengadaan baru barang milik daerah hasil cetak/output dari SIM Aset yang tertuang dalam Perwal No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun beberapa faktor penghambat pencapaian sasaran ini sebagai berikut :

1. Pengelola Keuangan SKPD kurang mematuhi ketentuan yang berlaku
2. Kurangnya pemahaman penyusun laporan keuangan tentang SAP dan Kebijakan Akuntansi

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki banyak manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Beberapa manfaatnya antara lain :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, anggaran bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2. Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang penting, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan keuangan yang baik mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

4. Menjamin Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan yang efektif memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara optimal, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana. Ini penting agar anggaran daerah bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang benar dan tidak terbuang sia-sia.

5. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, dan menarik investasi.

6. Mempercepat Proses Pembangunan

Dengan pengelolaan keuangan yang efisien, proyek pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

7. Mengurangi Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pengelolaan administrasi, mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat kemajuan pembangunan daerah.

3.1.5. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel III.5.2  
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan          |                                              |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi | % Capaian | Anggaran    |             |           |                   |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
|    |                                         |                                              |                                                                                                         |                                                                                                                              |        |         |           |           | Pagu        | Realisasi   | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1  | 2                                       |                                              |                                                                                                         | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6         | 7         | 8           | 9           | 10        | 11                |
|    | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                              |                                                                                                         | Cakupan Pengelolaan BMD                                                                                                      | 100    | %       | 100       | 100.00%   | 814,966,750 | 680,210,569 | 83.46%    | 1.20              |
|    |                                         | 12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                                                                         | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD                                        | 74.68  | %       | 89.08     | 119.28%   | 814,966,750 | 680,210,569 | 83.46%    | 1.43              |
|    |                                         |                                              | Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 2      | dokumen | 2         | 100.00%   | 17,507,200  | 17,225,800  | 98.39%    | 1.02              |
|    |                                         |                                              | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | 7      | dokumen | 7         | 100.00%   | 18,614,900  | 18,537,500  | 99.58%    | 1.00              |
|    |                                         |                                              | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | 1      | laporan | 1         | 100.00%   | 212,426,356 | 204,245,957 | 96.15%    | 1.04              |
|    |                                         |                                              | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 1      | laporan | 1         | 100.00%   | 33,525,400  | 32,428,000  | 96.73%    | 1.03              |
|    |                                         |                                              | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 12     | laporan | 12        | 100.00%   | 169,288,200 | 102,398,984 | 60.49%    | 1.65              |
|    |                                         |                                              | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 4      | laporan | 4         | 100.00%   | 112,735,900 | 95,880,600  | 85.05%    | 1.18              |
|    |                                         |                                              | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 4      | dokumen | 4         | 100.00%   | 75,105,866  | 35,245,900  | 46.93%    | 2.13              |

|  |  |  |                                                                     |                                                                       |     |         |     |         |             |             |        |      |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-------------|-------------|--------|------|
|  |  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                       | 14  | laporan | 14  | 100.00% | 148,953,328 | 147,535,828 | 99.05% | 1.01 |
|  |  |  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 200 | orang   | 200 | 100.00% | 26,809,600  | 26,712,000  | 99.64% | 1.00 |

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan supporting untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, sehingga pelaksanaannya selaras dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaannya juga tidak terdapat kendala dan tercapai 100%.

Faktor pendorong keberhasilan :

- Regulasi dari pusat terkait pengelolaan Barang Milik Daerah , Permendagri No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri No.19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Kebijakan Pengajuan pembayaran belanja modal atau barang inventaris dilampiri dengan surat pernyataan pengadaan baru barang milik daerah hasil cetak/ output dari SimAset yang tertuang dalam Perwal No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Pada realisasi kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah” tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 agak mengalami penurunan meskipun apabila dibandingkan dengan realisasi 2023 dan target tahun 2024 tetap melampaui. Hal ini dikarenakan dinamika permasalahan terkait pengelolaan BMD sebagai berikut :

- Sering bergantinya pengurus barang dan belum optimalnya pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan BMD membuat proses pembuatan laporan barang / penatausahaan barang masih kurang optimal;
- Pada tahun 2024 terdapat perubahan metode pensertifikatan yang semula secara manual beralih ke persertifikatan secara elektronik sehingga membutuhkan koordinasi lebih dengan OPD dan Kantor pertanahan Kota Magelang, salah satunya dalam penyiapan akun-akun yang dibutuhkan. Dikarenakan tahun

pertama dalam implementasi, pelayanan yang diperoleh dalam proses pensertifikatan secara elektronik belum berjalan lancar.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif memberikan berbagai manfaat, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat. Beberapa manfaat pengelolaan BMD antara lain :

a. Peningkatan efisiensi penggunaan barang

Pengelolaan yang baik memastikan bahwa barang milik daerah digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Hal ini mengurangi pemborosan serta meningkatkan manfaat dari barang tersebut, seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, dan aset lainnya.

b. Mengurangi potensi penyalahgunaan dan kerugian Negara

Pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel dapat mencegah penyalahgunaan atau penyewaan barang milik daerah yang tidak sesuai aturan. Hal ini membantu meminimalkan kerugian negara yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan atau hilangnya aset daerah.

c. Meningkatkan pemeliharaan dan umur pakai barang

Dengan pengelolaan yang tepat, barang milik daerah akan lebih terawat dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Pemeliharaan yang baik juga dapat mengurangi biaya penggantian barang yang rusak atau usang, serta meningkatkan efisiensi operasional.

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Pengelolaan BMD yang transparan dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan publik untuk mengetahui dan memantau penggunaan barang milik daerah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mengurangi potensi penyalahgunaan aset.

e. Meningkatkan penerimaan daerah

Barang milik daerah adalah bagian dari kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang efisien, nilai barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pembangunan daerah, baik melalui pemanfaatan langsung ataupun pendayagunaan untuk kegiatan ekonomi daerah.

3.1.6. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Tabel III.5.3  
 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan        |                                           |                                                                                                                            | Idikator Kinerja                                                                     | Tar get | Satuan      | Realisasi | % Capaian | Anggaran      |               |           |                   |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
|    |                                       |                                           |                                                                                                                            |                                                                                      |         |             |           |           | Pagu          | Realisasi     | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1  | 2                                     |                                           |                                                                                                                            | 3                                                                                    | 4       | 5           | 6         | 7         | 8             | 9             | 10        | 11                |
|    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |                                           |                                                                                                                            | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                        | 146.85  | %           | 160.98    | 109.62%   | 2,127,883,276 | 1,767,635,031 | 83.07%    | 1.32              |
|    |                                       | 13.Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah |                                                                                                                            | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah                                          | 100     | %           | 103.88    | 103.88%   | 2,127,883,276 | 1,767,635,031 | 83.07%    | 1.25              |
|    |                                       |                                           | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                      | 1       | dokumen     | 1         | 100.00%   | 1,603,626,246 | 1,276,497,095 | 79.60%    | 1.26              |
|    |                                       |                                           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah      | 4       | laporan     | 4         | 100.00%   | 13,627,400    | 13,627,400    | 100.00%   | 1.00              |
|    |                                       |                                           | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 17      | laporan     | 17        | 100.00%   | 76,222,120    | 73,763,900    | 96.77%    | 1.03              |
|    |                                       |                                           | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 48a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                         | 1,200   | Objek Pajak | 1,200     | 100.00%   | 16,650,680    | 16,594,700    | 99.66%    | 1.00              |
|    |                                       |                                           | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                | 36,000  | dokumen     | 36,000    | 100.00%   | 57,332,350    | 56,295,850    | 98.19%    | 1.02              |
|    |                                       |                                           | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi    | 12      | dokumen     | 12        | 100.00%   | 6,917,400     | 6,887,000     | 99.56%    | 1.00              |
|    |                                       |                                           | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                              | 10      | dokumen     | 10        | 100.00%   | 234,093,630   | 205,561,300   | 87.81%    | 1.14              |

|  |  |  |                                                       |                                                                                 |    |         |    |         |            |            |        |      |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|------------|------------|--------|------|
|  |  |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 | dokumen | 12 | 100.00% | 34,477,850 | 34,454,751 | 99.93% | 1.00 |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | 4  | laporan | 4  | 100.00% | 51,508,600 | 50,616,649 | 98.27% | 1.02 |
|  |  |  | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah           | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah         | 1  | laporan | 1  | 100.00% | 33,427,000 | 33,336,386 | 99.73% | 1.00 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat jika pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat terselesaikan dengan baik hingga akhir tahun 2024. Pelaksanaan Program pengelolaan pendapatan daerah ini pula telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan sehingga sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai dengan baik bahkan melampaui dari target yang ditentukan pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan ini antara lain :

- a. Pengelolaan yang Efektif: Pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien telah membantu meningkatkan pendapatan.
- b. Peningkatan Pajak Daerah: Peningkatan tarif pajak daerah dan perluasan basis pajak telah membantu meningkatkan pendapatan dari pajak daerah.
- c. Optimalisasi Retribusi Daerah: Optimalisasi retribusi daerah telah membantu meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah.
- d. Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pengelolaan kekayaan daerah yang efektif telah membantu meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menghalangi pencapaian sasaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Potensi Ekonomi Daerah
 

Beberapa daerah memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya alam atau potensi ekonomi lainnya yang bisa dijadikan sumber PAD. Daerah yang kurang memiliki

- sumber daya alam atau industri besar mungkin kesulitan dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak atau retribusi daerah.
- b. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak
 

Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak daerah dapat menjadi faktor penghambat. Warga atau pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya kontribusi pajak daerah bisa mengurangi potensi PAD yang bisa diperoleh.
  - c. Sistem Perpajakan dan Retribusi yang Tidak Efektif
 

Sistem perpajakan dan retribusi daerah yang tidak efisien atau tidak transparan dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pemungutan pajak atau retribusi. Prosedur yang rumit, kurangnya teknologi, atau ketidakmampuan aparat untuk melakukan penagihan secara optimal juga menjadi hambatan.

- Manfaat keberhasilan.
- Keberhasilan program pengelolaan pendapatan daerah telah berdampak positif pada pembangunan daerah, antara lain:
- a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
 

Peningkatan pendapatan daerah telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  - b. Pembangunan Infrastruktur;
 

Peningkatan pendapatan daerah telah membantu membiayai pembangunan infrastruktur.
  - c. Peningkatan Pelayanan Publik;
 

Peningkatan pendapatan daerah telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.1.7. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Strategis BPKAD Kota Magelang

Tabel III.5.4  
 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Strategis BPKAD Kota Magelang

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Idikator Kinerja | Tar get | Satuan | Realisasi | % Capaian | Anggaran |           |           |                   |
|----|--------------------------------|------------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|    |                                |                  |         |        |           |           | Pagu     | Realisasi | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1  | 2                              | 3                | 4       | 5      | 6         | 7         | 8        | 9         | 10        | 11                |

|  |                                                             |                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |     |         |                |               |        |      |
|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|----------------|---------------|--------|------|
|  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                     |                                                                                       | Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. | 100 | dokumen | 100 | 100.00% | 13,336,605,013 | 9,294,963,435 | 69.70% | 1.43 |
|  |                                                             | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       | Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD                                                                                                                                                                                                                   | 100 | %       | 100 | 100.00% | 19,588,400     | 9,376,200     | 47.87% | 2.09 |
|  |                                                             |                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   | dokumen | 6   | 100.00% | 5,356,400      | 5,341,700     | 99.73% | 1.00 |
|  |                                                             |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                       | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 1,933,700      | 1,918,500     | 99.21% | 1.01 |
|  |                                                             |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                   | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 1,816,800      | 1,776,000     | 97.75% | 1.02 |
|  |                                                             |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                       | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 1,514,100      | 1,492,600     | 98.58% | 1.01 |
|  |                                                             |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                   | 1   | dokumen | 1   | 100.00% | 1,412,900      | 1,353,400     | 95.79% | 1.04 |
|  |                                                             |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                 | 30  | laporan | 30  | 100.00% | 7,554,500      | 7,494,000     | 99.20% | 1.01 |

|  |  |                                              |                                                                             |                                                                                                                                              |     |             |     |         |                |               |         |      |
|--|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|---------|----------------|---------------|---------|------|
|  |  | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                                                                             | Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan                                                                    | 100 | %           | 100 | 100.00% | 11,250,651,043 | 7,500,009,765 | 66.66%  | 1.50 |
|  |  |                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 38  | Orang/Bulan | 38  | 100.00% | 11,184,658,415 | 7,434,120,077 | 66.47%  | 1.50 |
|  |  |                                              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                          | 24  | dokumen     | 24  | 100.00% | 8,456,400      | 8,434,460     | 99.74%  | 1.00 |
|  |  |                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 18  | laporan     | 18  | 100.00% | 57,536,228     | 57,455,228    | 99.86%  | 1.00 |
|  |  | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                                             | Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan                                                                               | 100 | %           | 100 | 100.00% | 1,481,900      | 1,467,900     | 99.06%  | 1.01 |
|  |  |                                              | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                             | 12  | Dokumen     | 12  | 100.00% | 1,481,900      | 1,467,900     | 99.06%  | 1.01 |
|  |  | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                                                             | Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah                                                                                 | 100 | %           | 100 | 100.00% | 140,141,400    | 123,954,600   | 88.45%  | 1.13 |
|  |  |                                              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor          | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                           | 20  | Paket       | 20  | 100.00% | 3,972,800      | 3,675,000     | 92.50%  | 1.08 |
|  |  |                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah paket bahan 52a katas kantor yang disediakan                                                                                          | 80  | Paket       | 80  | 100.00% | 17,097,200     | 14,112,500    | 82.54%  | 1.21 |
|  |  |                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                    | 13  | Paket       | 13  | 100.00% | 6,315,100      | 6,018,500     | 95.30%  | 1.05 |
|  |  |                                              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                 | 3   | Dokumen     | 3   | 100.00% | 4,200,000      | 4,200,000     | 100.00% | 1.00 |
|  |  |                                              | Penyediaan Bahan/Material                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                  | 30  | Paket       | 30  | 100.00% | 4,896,300      | 4,883,000     | 99.73%  | 1.00 |
|  |  |                                              | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                     | 14  | laporan     | 14  | 100.00% | 10,868,000     | 10,830,000    | 99.65%  | 1.00 |

|  |  |                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                        |       |         |       |         |               |               |        |      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|---------------|---------------|--------|------|
|  |  |                                                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 42    | laporan | 42    | 100.00% | 92,792,000    | 80,235,600    | 86.47% | 1.16 |
|  |  | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                                                                                                                    | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 100   | %       | 100   | 100.00% | 121,525,714   | 113,295,500   | 93.23% | 1.07 |
|  |  |                                                                          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 11    | Unit    | 11    | 100.00% | 121,525,714   | 113,295,500   | 93.23% | 1.07 |
|  |  | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                    | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 100   | %       | 100   | 100.00% | 485,562,322   | 384,386,723   | 79.16% | 1.26 |
|  |  |                                                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 3,600 | laporan | 3,600 | 100.00% | 52,813,460    | 51,586,160    | 97.68% | 1.02 |
|  |  |                                                                          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12    | laporan | 12    | 100.00% | 332,186,512   | 260,395,671   | 78.39% | 1.28 |
|  |  |                                                                          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12    | laporan | 12    | 100.00% | 100,562,350   | 72,404,892    | 72.00% | 1.39 |
|  |  | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 100   | %       | 100   | 100.00% | 1,317,654,234 | 1,152,472,747 | 87.46% | 1.14 |
|  |  |                                                                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 24    | unit    | 24    | 100.00% | 224,360,750   | 186,324,243   | 83.05% | 1.20 |
|  |  |                                                                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50    | unit    | 50    | 100.00% | 257,798,864   | 184,702,250   | 71.65% | 1.40 |
|  |  |                                                                          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 91    | unit    | 91    | 100.00% | 49,512,000    | 40,005,000    | 80.80% | 1.24 |

|  |  |  |                                                              |                                                                          |    |      |    |         |             |             |        |      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|---------|-------------|-------------|--------|------|
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                               | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara                                 | 4  | unit | 4  | 100.00% | 192,700,000 | 191,142,000 | 99.19% | 1.01 |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 11 | unit | 11 | 100.00% | 593,282,620 | 550,299,254 | 92.75% | 1.08 |

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat efisiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien. Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas. Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien.

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efisiensi untuk pencapaian indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran BPKAD Kota Magelang menunjukkan tingkat yang bervariasi. Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, serta 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan keseluruhannya telah menunjukkan efisiensi.

Pada tabel tersebut di atas pula terdapat anggaran yang serapannya sangat kecil yaitu 48,81% terdapat pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan lebih tepatnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, di mana sub kegiatan ini untuk mengampu Belanja Tak Terduga yang harus dianggarkan setiap tahunnya pada APBD. Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga, disebutkan bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Sehingga harus dianggarkan dalam belanja daerah. Oleh karenanya realisasi dari Belanja Tak Terduga ini tidak bisa diharapkan memenuhi target yang telah ditetapkan.

### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD. Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga

menjalankan ketugasan dalam pelayanan di bidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah.

Tabel III.6  
Kontribusi Sasaran BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024

| No | Pemerintah Daerah                               |                                                 |            |            | Perangkat Daerah                                      |                                                                  |        |           |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | Sasaran Pemerintah Daerah                       | Indikator Sasaran Pemerintah Daerah             | Target     | Realisasi  | Sasaran Perangkat Daerah                              | Indikator Sasaran Perangkat Daerah                               | Target | Realisasi |
|    | Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Opini BPK                                 | WTP (100%) | WTP (100%) | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah     | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah     | 91,43% | 100%      |
|    |                                                 | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | 91,43%     | 100%       |                                                       |                                                                  |        |           |
|    |                                                 | Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah | 92,64%     | 99,35%     | Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 92,64% | 99,35%    |
|    |                                                 | Rasio kemandirian keuangan daerah               | 35,64%     | 50,44%     | Meningkatnya pendapatan daerah                        | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah                             | 25,81% | 34,05%    |
|    |                                                 | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah            | 25,81%     | 34,05%     |                                                       |                                                                  |        |           |

Uraian penjelasan tabel :

Keterkaitan antara kinerja sasaran Pemerintah Daerah “Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel” yang terdapat pada RPJMD Kota Magelang periode tahun 2021-2026 dengan sasaran BPKAD Kota Magelang yang terdapat pada Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel III.6 di atas. Dari kelima indikator sasaran yang ada di BPKAD Kota Magelang, realisasi kinerja pada tahun 2024 ini telah melampaui target yang

ditetapkan. Hal tersebut berarti bahwa kinerja BPKAD Kota Magelang sangat mendukung terhadap ketercapaian kinerja dari Pemerintah Kota Magelang.

Tabel III.7  
Kontribusi Program BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kota Magelang

| No | Program Unggulan Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah                        |                                                                         |         |           |             |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
|    |                                    | Program Perangkat Daerah                | Indikator Program Perangkat Daerah                                      | Target  | Realisasi | % Realisasi |
| 1. | Magesty (Magelang smart City)      | Program Pengelolaan Keuangan Daerah     | 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran       | 100%    | 100%      | 100%        |
|    |                                    |                                         | 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan | 100%    | 100%      | 100%        |
|    |                                    |                                         | 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi      | 100%    | 100%      | 100%        |
|    |                                    | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan pengelolaan barang milik daerah                                 | 85,71%  | 100%      | 116,67%     |
|    |                                    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                           | 146,85% | 160,98%   | 109,62%     |

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.8  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

| No. | Sasaran                                               | Indikator Kinerja                                                |        |           |           | Anggaran Perubahan |               |           | Tingkat Efisiensi |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|     |                                                       | Indikator                                                        | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran           | Realisasi     | % Capaian |                   |
|     |                                                       |                                                                  |        |           |           | (Rp.)              | (Rp.)         |           |                   |
| 1   | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah     | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah     | 91,43% | 100%      | 109.37%   | 3,042,319,203      | 1,950,075,956 | 64.10%    | 1,71%             |
| 2   | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 92,64% | 99.35%    | 107.25%   | 814,966,750        | 680,210,569   | 83.46%    | 1,28%             |
| 3   | Meningkatnya Pendapatan daerah                        | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah                             | 25.81% | 34.05%    | 131.95%   | 2.127.883.276      | 1.767.635.031 | 83,07%    | 1,59%             |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup efisien. Ketiga indikator sasaran menunjukkan tingkat efisiensi lebih dari 1.

### 3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada tahun 2024 inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

1. Sistem Informasi Monitoring Reklame (SIMONARELA)

Dengan aplikasi Simonarela ini maka diharapkan penyelenggaraan reklame menjadi semakin terkendali dan terintegrasi, baik dari sisi perijinan (DPMPTSP), sisi perpajakan (BPKAD), maupun dari sisi penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP.

2. SI-LITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah)

Dengan Sistem Informasi Zona Nilai Tanah (SI-LITA), masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan nilai jual tanah diseluruh Kota Magelang hanya dengan mengakses <http://znt.magelangkota.go.id> tanpa harus LOGIN dan langsung bisa mengetahui nilai tanah.

3. SIAP GRAK (Sistem Aplikasi Gebyar Pajak)

Merupakan aplikasi guna memberikan keterbukaan informasi dalam pemungutan pajak daerah bahwa semua pajak yang dibayarkan oleh masyarakat/wajib pajak langsung masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah melalui berbagai kanal pembayaran seperti BIMA Mobile, QRIS, Alfamart-Indomart, Kantor Pos dan berbagai marketplace.

4. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.

5. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi BPKAD Kota Magelang misalnya aplikasi SIPD, Smart Magelang, SIABAH, SIAPTAMA, SIERA, P3DN, SIRUP, SPSE, e-persediaan, SIMASET, OMSPAN, ALADIN, dan aplikasi Gaji dari Taspen.

3.5 LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka BPKAD Kota Magelang sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor.

Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung BPKAD Kota Magelang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi refocusing dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor BPKAD Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Inventarisasi Lintas Sektor BPKAD Kota Magelang

| No | Kegiatan Lintas Sektor                                               | Kontribusi para Pihak |                                                                                                 | Output dan Kelompok Sasaran                               |                                                  | Manfaat                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | Pihak                 | Kontribusi                                                                                      | Output                                                    | Kelompok Sasaran                                 |                                                                                                                                                 |
| 1. | Penyusunan Dokumen Penganggaran                                      | Kemendagri            | Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penganggaran daerah melalui SIPD            | Dokumen penganggaran                                      | 28 OPD, Pemerintah Kota Magelang, dan masyarakat | Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif. |
|    |                                                                      | Bapperida             | Penyelarasan RKPD dengan KUA PPAS                                                               |                                                           |                                                  | Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait penganggaran daerah.                           |
|    |                                                                      | Bagian Hukum          | Penetapan peraturan /keputusan Wali Kota                                                        |                                                           |                                                  | Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan penganggaran program/kegiatan/subk egiatan bagi perangkat daerah.                                         |
|    |                                                                      | Inspektorat           | Review dokumen penganggaran                                                                     |                                                           |                                                  |                                                                                                                                                 |
| 2. | Penyusunan dokumen/laporan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah | Kemendagri            | Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD | Dokumen/laporan terkait pelaksanaan perbendaharaan daerah | 28 OPD, Pemerintah Kota Magelang                 | Manfaat bagi OPD :Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.  |
|    |                                                                      | Bagian Hukum          | Harmonisasi peraturan /keputusan Wali Kota                                                      | Raperwal                                                  |                                                  | Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan                                                                         |

|    |                                                               |                                               |                                                                                            |                                                             |                     |                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | Bank Jateng                                   | Pelaksanaan sebagai Bank Persepsi Rekening Kas Umum Daerah                                 |                                                             |                     | daerah khususnya yang terkait perbendaharaan daerah.                                                                                            |
|    |                                                               | Kantor Pelayanan Pajak Pratama                | Rekonsiliasi data pajak pusat atas belanja daerah                                          | Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak Pusat       |                     | Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan penatausahaan keuangan bagi perangkat daerah.                                                 |
|    |                                                               | KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) | 1. Rekonsiliasi data/laporan pajak pusat atas belanja daerah.<br>2. Rekonsiliasi data BPJS | Berita Acara Rekonsiliasi                                   |                     |                                                                                                                                                 |
|    |                                                               | Inspektorat                                   | Reviu laporan DAU dan DAK                                                                  | Laporan Hasil Reviu                                         |                     |                                                                                                                                                 |
| 3. | Penyusunan dokumen/laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah | Kemenkeu                                      | Fasilitasi dan sosialisasi terkait kebijakan SAP dari Kemenkeu                             | Laporan Realisasi APBD                                      | 28 OPD, masyarakat  | Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif. |
|    |                                                               | Kemendagri                                    | Evaluasi dan monitoring realisasi APBD                                                     | Laporan Realisasi APBD                                      |                     | Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.       |
|    |                                                               | Provinsi                                      | Evaluasi dan monitoring realisasi APBD                                                     | Laporan Pelaksanaan APBD                                    |                     | Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bagi OPD.                                           |
|    |                                                               | DPRD                                          | Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                             | Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/ APBD Perubahan |                     |                                                                                                                                                 |
|    |                                                               | BPK-RI                                        | Pelaksanaan audit terhadap LKPD                                                            | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)                   |                     |                                                                                                                                                 |
| 4. | Kebijakan pengamanan asset (pensertifikatan)                  | Kantor Pertanahan Kota Magelang               | Fasilitasi dan koordinasi pensertifikatan dan pelayanan pertanahan lainnya.                | Sertifikat atas nama Pemkot Magelang                        | Barang Milik Daerah | Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif. |
|    |                                                               | DPUPR                                         | Proses PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Penataan Ruang)                       |                                                             |                     | Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya terkait pensertifikatan tanah.                     |
|    |                                                               | Disperkim                                     | Koordinasi terkait asset yang umumnya dalam kewenangan Disperkim meski                     |                                                             |                     | Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan                                                                                                           |

|    |                         |                                 |                                                                                         |                     |                         |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                 | belum terinventarisasi                                                                  |                     |                         | pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah.                                                                                                     |
|    |                         | Kecamatan                       | Fasilitasi dalam proses pengukuran dan persidangan                                      |                     |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | Kelurahan                       | Fasilitasi dalam proses pengukuran dan persidangan                                      |                     |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | Bag. Hukum                      | Penetapan peraturan /keputusan Wali Kota                                                |                     |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | Bapperida                       | Koordinasi dalam hal penyediaan data kajian/ analisis HBU ( <i>High and Best Uses</i> ) |                     |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | DPMPTSP                         | Koordinasi dalam hal penyediaan data perijinan                                          |                     |                         |                                                                                                                                                 |
| 5. | Pemungutan Pajak Daerah | Kemendagri                      | Evaluasi Raperda dan Perda terkait Pajak Daerah                                         | Perda               | Wajib Pajak, masyarakat | Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif. |
|    |                         | Kemenkeu                        | Evaluasi Raperda dan Perda                                                              | Perda               |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | Bagian Hukum                    | Fasilitasi dan harmonisasi Raperda, Raperwal, Perda dan Perwal terkait Pajak Daerah     | Perda dan Perwal    |                         | Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya terkait penerimaan dari pajak daerah.                |
|    |                         | Kemenkum ham                    | Evaluasi Raperwal dan Perwal terkait Pajak Daerah                                       | Peraturan Walikota  |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah | Fasilitasi dan harmonisasi Raperwal dan Perwal terkait Pajak Daerah                     | Peraturan Walikota  |                         | Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.                                                                      |
|    |                         | DPRD                            | Penetapan Raperda dan Perda Pajak Daerah                                                | Perda               |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | Inspektorat                     | Reviu pemungutan pajak daerah                                                           | Laporan hasil reviu |                         |                                                                                                                                                 |
|    |                         | KPP Pratama                     | Tukar menukar data/informasi pajak daerah dan pajak pusat                               | Laporan pajak       |                         |                                                                                                                                                 |

|  |  |             |                                                                                    |                               |  |  |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  |  | Bank Jateng | Pengelolaan penerimaan dari pajak daerah                                           | Laporan penerimaan Kas Daerah |  |  |
|  |  | Satpol      | Penegakan Perda                                                                    |                               |  |  |
|  |  | DPMPTSP     | Penegakan Perda                                                                    |                               |  |  |
|  |  | Kecamatan   | Sinergi kegiatan mulai dari inventarisasi hingga penagihan Pajak Bumi dan Bangunan | Terlunasinya PBB              |  |  |
|  |  | Kelurahan   | Sinergi kegiatan mulai dari inventarisasi hingga penagihan Pajak Bumi dan Bangunan | Terlunasinya PBB              |  |  |

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| BAB IV         |                                    |
| PENUTUP        |                                    |
| Bab IV berisi: |                                    |
| 1.             | Kesimpulan                         |
| 2.             | Rekomendasi<br>Peningkatan Kinerja |

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1 Simpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 108,30% (kategori Sangat Tinggi);
- Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 141,53% (kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 107,28% (kategori Sangat Tinggi);

- Sasaran “Meningkatnya pendapatan daerah.” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dengan capaian sebesar 131,95% (kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan 3 Sasaran tersebut, secara rata-rata jumlah dari 5 indikator kinerja tersebut diperoleh angka 117,81%, sehingga bisa dikatakan secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja bahkan melebihi.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.321.774.242,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.692.884.991 ,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 70,87%. Di dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk Belanja Tak Terduga yang terdapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 1.987.166.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 969.996.500 ,00.

#### **4.2 Langkah Perbaikan Kinerja**

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2024, upaya penyelesaian dan langkah-langkah perbaikan kinerjanya sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
2. Melakukan reviu terhadap target indikator sasaran dengan target indikator program sehingga data yang tersaji menjadi sinkron dan selalu didapatkan target yang *challenging*.
3. Dalam meningkatkan kinerja perlu percepatan peningkatan kualitas kinerja sehingga diperoleh capaian kinerja yang maksimal.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada pengurus barang pengguna, pengelola keuangan SKPD, dan pelaksana akuntansi SKPD.
5. Melakukan inovasi secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang.

Magelang, 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si.

Pembina Tingkat I  
NIP. 197905171998021001

LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSILOWATI

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIS

Jabatan : WALI KOTA MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG

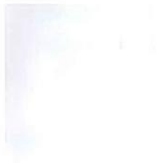
| No.<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)                                           | Indikator Kinerja<br>(3)                                                             | Target<br>(4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.         | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | 92,03%        |
| 2.         | Meningkatnya Kemandirian Daerah                                    | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | 35,64%        |
| 3.         | Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas           | Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Berkualitas                      | 100%          |
| 4.         | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                  | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 91,43%        |
| 5.         | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah              | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 92,64%        |
| 6.         | Meningkatnya Pendapatan daerah                                     | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                 | 25,81%        |

| Program                                                      | Anggaran              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 10.047.696.382,00 |
| 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Rp. 6.438.636.795,00  |
| 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                   | Rp. 780.064.126,00    |
| 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Rp. 2.131.020.801,00  |

  
Pihak Kedua,  
MUHAMMAD NUR AZIS

Magelang, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
  
SUSILOWATI

Perubahan Perjanjian Kinerja



**PERUBAHAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANANG KRISTIYONO  
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama  
Nama : AHMAD AZIS  
Jabatan : Pjs. WALI KOTA MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Oktober 2024

Pihak Kedua  
  
AHMAD AZIS

Pihak Pertama  
  
NANANG KRISTIYONO

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG

| No.<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)                                           | Indikator Kinerja<br>(3)                                                             | Target<br>(4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.         | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | 92,03%        |
| 2.         | Meningkatnya Kemandirian Daerah                                    | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | 35,64%        |
| 3.         | Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas           | Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Berkualitas                      | 100%          |
| 4.         | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                  | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 91,43%        |
| 5.         | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah              | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 92,64%        |
| 6.         | Meningkatnya Pendapatan daerah                                     | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                 | 25,81%        |

| Program                                                      | Anggaran              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 13.336.605.013,00 |
| 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Rp. 3.055.153.203,00  |
| 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                   | Rp. 814.966.750,00    |
| 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Rp. 2.087.947.276,00  |

Magelang, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
  
ATMAD AZIS

Pihak Pertama,  
  
NANANG KRISTİYONO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363646  
Fax. (0293) 364910 Magelang 6101  
Website : inspektorat.magelangkota.go.id, Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

Magelang, 29 Agustus 2024

Nomor : 700.1.2.1/015.B.EV/600  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang  
di  
**MAGELANG**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/011.1.EV/600 Tanggal 12 Agustus 2024.

**b. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**c. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi internal yang mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan evaluasi atas hasil program yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*.

Dengan bobot penilaian sebagai berikut:

| No | Komponen            | Bobot | Sub Komponen                                                                                                                                       |
|----|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30%   | a. Rencana Strategis 10%, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemenuhan Renstra (2%);</li><li>- Kualitas Renstra (3%); dan</li></ul> |

| No    | Komponen           | Bobot | Sub Komponen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Renstra (5%)</li> </ul> b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan RKT (4%);</li> <li>- Kualitas RKT (6%); dan</li> <li>- Implementasi RKT (10%).</li> </ul> |
| 2.    | Pengukuran Kinerja | 25%   | a. Pemenuhan pengukuran 5%<br>b. Kualitas pengukuran 7,5%<br>c. Implementasi pengukuran 12,5%                                                                                                                                                                              |
| 3.    | Pelaporan Kinerja  | 10%   | a. Pemenuhan pelaporan 2%<br>b. Penyajian informasi kinerja 3%<br>c. Pemanfaatan informasi kinerja 5%                                                                                                                                                                      |
| 4.    | Evaluasi Internal  | 15%   | a. Pemenuhan evaluasi 3%<br>b. Kualitas evaluasi 4,5%<br>c. Pemanfaatan hasil evaluasi 7,5%                                                                                                                                                                                |
| 5.    | Capaian Kinerja    | 20%   | a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) 5%<br>b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) 15%                                                                                                                                                                       |
| Total |                    | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**d. Metodologi Evaluasi**

Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Evaluasi AKIP dilakukan dengan cara menilai setiap kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan profesional *judgement* dari para evaluator dan pengendali teknis (supervisor) berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang setiap tiga bulan (triwulan);
- 2) Melaksanakan pengukuran capaian kinerja indikator Sub Kegiatan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan);
- 3) Menyusun IKI seluruh Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang serta melaksanakan monitoring dan evaluasi IKI;
- 4) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan narasi yang menjelaskan hambatan dan kegagalan indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target;
- 5) LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya (tahun n+1).

2. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

| Predikat                 | Interpretasi                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA<br>(Nilai > 90 – 100) | Sangat Memuaskan.<br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien ( <i>reform</i> ). |

| Predikat                | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A<br>(Nilai > 80 – 90)  | Memuaskan.<br>Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).                                                                                                                                            |
| BB<br>(Nilai > 70 – 80) | Sangat Baik.<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 bidang/sekretariat. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III (atau yang setara). |
| B<br>(Nilai > 60 – 70)  | Baik.<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bidang/sekretariat. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II.                                                                                                                                               |
| CC<br>(Nilai > 50 – 60) | Cukup (Memadai).<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada bidang/sekretariat.                                                                                                                                                                                         |

| Predikat               | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C<br>(Nilai > 30 – 50) | Kurang.<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.                                                                                              |
| D<br>(Nilai > 0 – 30)  | Sangat Kurang.<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam Implementasi SAKIP. |

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 82,72 (A) Memuaskan, (sebagaimana *print out* kertas kerja terlampir) yang artinya bahwa telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1.  | Perencanaan Kinerja   | 30    | 25,42 |
| 2.  | Pengukuran Kinerja    | 25    | 21,39 |
| 3.  | Pelaporan Kinerja     | 10    | 10,00 |
| 4.  | Evaluasi Internal     | 15    | 12,00 |
| 5.  | Capaian Kinerja       |       |       |
|     | a. <i>Output</i>      | 5     | 3,50  |
|     | b. <i>Outcome</i>     | 15    | 10,42 |

|                               |     |       |
|-------------------------------|-----|-------|
| Nilai Hasil Evaluasi          | 100 | 82,72 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |     | A     |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

**a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja diketahui bahwa:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.
- 2) Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan PK Tahun 2023 telah menyajikan IKU. Renstra juga telah selaras dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- 3) Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga telah menyusun Peta Strategis Kinerja (Pohon Kinerja). Pohon Kinerja telah dilengkapi dengan kondisi, indikator, target jangka menengah dan *cross cutting issues*.

**b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui bahwa:

- 1) Target kinerja dalam Renstra, IKU, PK dan *cross cutting issues* telah dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi serta ditindaklanjuti. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dilakukan setiap tiga bulan (triwulan).
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan indikator kinerja telah mencapai target yang diperjanjikan.
- 3) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi yaitu Smart Magelang yang dapat diakses melalui <https://smart.magelangkota.go.id/>. Pengukuran dilakukan setiap tiga bulan (triwulan).

#### **c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diketahui bahwa:

- 1) LKjIP telah disusun dan telah direviu oleh APIP.
- 2) LKjIP telah menyajikan:
  - a) Seluruh capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK;
  - b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023;
  - c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;
  - d) Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta upaya/solusi yang telah dilakukan;
  - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.
  - g) Cascading kinerja;

- h) Instrumen pendukung capaian kinerja;
  - i) Inovasi;
  - j) Faktor pendukung keberhasilan;
  - k) Langkah-langkah perbaikan ke depan; dan
  - l) Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022.
- 3) Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, juga untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.

**d. Evaluasi atas Evaluasi Internal**

Berdasarkan hasil evaluasi atas evaluasi internal diketahui bahwa:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sudah memiliki pedoman atau SOP untuk mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 2) Evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Hasil evaluasi berupa rekomendasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sudah ditindaklanjuti.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan: perencanaan maupun pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan penerapan manajemen kinerja.

**e. Evaluasi atas Capaian Kinerja**

Indikator kinerja tahun 2023 telah mencapai target yang diperjanjikan.

### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil evaluasi serta dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan selalu memperhatikan target indikator kinerja yang relevan/*challenging* melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi atas target indikator kinerja yang diperjanjikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, namun masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai rekomendasi diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



**LARSITA, S.E., M.Sc.CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

**TEMBUSAN** dikirim kepada Yth. :

1. Wali Kota Magelang;
2. Wakil Wali Kota Magelang;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.

*Laporan Hasil Evaluasi AKIP BPKAD Kota Magelang*

**KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2023**

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                                                                                                                                      | BOBOT | OPD     |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |       | JAWABAN | NILAI |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 4       | 5     |
| A. | PERENCANAAN KINERJA (30%)                                                                                                                                                                                                  | 30,00 | 84,72%  | 25,42 |
| I. | PERENCANAAN STRATEGIS (10%)                                                                                                                                                                                                | 10,00 | 84,17%  | 8,42  |
| a. | PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH TELAH TERSEDIA (2%)                                                                                                                                                                    | 2,00  | 100,00% | 2,00  |
| 1  | Rencana Strategis (Renstra) telah disusun                                                                                                                                                                                  |       | Y       | 1,00  |
| 2  | Renstra telah memuat tujuan                                                                                                                                                                                                |       | Y       | 1,00  |
| 3  | Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya).                                                                                  |       | A       | 1,00  |
| 4  | Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilan (dapat diidentifikasi target keberhasilannya)                                                                                                                      |       | A       | 1,00  |
| 5  | Dokumen Renstra telah memuat sasaran                                                                                                                                                                                       |       | Y       | 1,00  |
| 6  | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran                                                                                                                                                                     |       | A       | 1,00  |
| 7  | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan                                                                                                                                                                                |       | A       | 1,00  |
| 8  | Renstra telah menyajikan IKU                                                                                                                                                                                               |       | A       | 1,00  |
| 9  | Renstra telah dipublikasikan                                                                                                                                                                                               |       | Y       | 1,00  |
| 10 | Pohon Kinerja (Peta Strategi Kinerja) telah disusun                                                                                                                                                                        |       | Y       | 1,00  |
| b. | KUALITAS RENSTRA (3%)<br>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART dan Cukup serta memperhatikan kinerja Bidang/sector lain (Crosscutting) | 3,00  | 88,89%  | 2,67  |
| 11 | Tujuan/Hasil program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah berorientasi hasil                                                                                                                                             |       | A       | 1,00  |
| 12 | Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik                                                                                  |       | A       | 1,00  |
| 13 | Pohon Kinerja telah dilengkapi dengan Kondisi, Indikator dan Target Jangka Menengah                                                                                                                                        |       | B       | 0,75  |
| 14 | Sasaran telah berorientasi hasil                                                                                                                                                                                           |       | A       | 1,00  |
| 15 | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                                                                                                         |       | A       | 1,00  |
| 16 | Target kinerja ditetapkan dengan baik                                                                                                                                                                                      |       | A       | 1,00  |
| 17 | Program/kegiatan (inisiatif dalam Pohon Kinerja) merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan                                                                                                 |       | B       | 0,75  |
| 18 | Dokumen Renstra (Pohon Kinerja) telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD/Dokumen Renstra atasannya                                                                                                                         |       | B       | 0,75  |
| 19 | Pohon Kinerja telah mengidentifikasi kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sector lain (cross-cutting issues)                                                                                               |       | B       | 0,75  |
|    |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |       |

| NO         | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                                                                                                                                                                         | BOBOT        | OPD            |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |              | JAWABAN        | NILAI        |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4              | 5            |
|            | <b>c. PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) RENSTRA (5%)</b><br><b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>                                                                                                               | <b>5,00</b>  | <b>75,00%</b>  | <b>3,75</b>  |
| 20         | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan                                                                                                                                                                            |              | B              | 0,75         |
| 21         | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan                                                                                                                                                               |              | B              | 0,75         |
| 22         | <b>Kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/ sektor lain (cross-cutting issues) telah diukur dan ditindaklanjuti</b>                                                                                                                              |              | <b>B</b>       | <b>0,75</b>  |
| 23         | <b>Pohon Kinerja dijadikan acuan mereviu dan menyempurnakan struktur organisasi</b>                                                                                                                                                                           |              | B              | 0,75         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| <b>II.</b> | <b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>20,00</b> | <b>85,00%</b>  | <b>17,00</b> |
|            | <b>a. PEMENUHAN (KEBERADAAN) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>4,00</b>  |
| 1          | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun                                                                                                                                                                                                             |              | Y              | 1,00         |
| 2          | Perjanjian Kinerja (PK) <b>atau SKP</b> telah disusun                                                                                                                                                                                                         |              | A              | 1,00         |
| 3          | PK telah menyajikan IKU                                                                                                                                                                                                                                       |              | A              | 1,00         |
| 4          | PK <b>atau SKP</b> telah dipublikasikan                                                                                                                                                                                                                       |              | A              | 1,00         |
| 5          | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada                                                                                                                                                                                                                           |              | Y              | 1,00         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |              |
|            | <b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b><br><b>Dokumen Perencanaan kinerja tahunan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART serta memperhatikan kinerja Bidang/sektor lain (Crosscutting)</b> | <b>6,00</b>  | <b>91,67%</b>  | <b>5,50</b>  |
| 6          | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>                                                                                                                                                                                                                       |              | A              | 1,00         |
| 7          | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                                                                                                                                     |              | A              | 1,00         |
| 8          | Target kinerja ditetapkan dengan baik                                                                                                                                                                                                                         |              | A              | 1,00         |
| 9          | Kegiatan relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran                                                                                                                                                                                                          |              | A              | 1,00         |
| 10         | Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Renstra                                                                                                                                                                                                               |              | A              | 1,00         |
| 11         | <b>Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Pohon Kinerja</b>                                                                                                                                                                                                  |              | A              | 1,00         |
| 12         | Dokumen PK dan SKP telah menjanjikan kondisi yang seharusnya diwujudkan (bukan sekedar memuat kegiatan/subkegiatan yang akan dilakukan sesuai tugas fungsi)                                                                                                   |              | B              | 0,75         |
| 13         | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja                                                                                                                                                                              |              | B              | 0,75         |
| 14         | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja                                                                                                                    |              | B              | 0,75         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |              |
|            | <b>c. PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10,00</b> | <b>75,00%</b>  | <b>7,50</b>  |

| NO                                 | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                                                                                               | BOBOT        | OPD           |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                     |              | JAWABAN       | NILAI        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                   | 3            | 4             | 5            |
| 15                                 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran                                                                                                                      |              | B             | 0,75         |
| 16                                 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan                                                                                                       |              | B             | 0,75         |
| 17                                 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala                                                                                                              |              | B             | 0,75         |
| 18                                 | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan                                                                                                      |              | B             | 0,75         |
| 19                                 | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV ( <b>atau yang disetarakan) dan individu</b>                  |              | B             | 0,75         |
| <b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>25,00</b> | <b>85,56%</b> | <b>21,39</b> |
| <b>I.</b>                          | <b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>                                                                                                                                                    | <b>5,00</b>  | <b>95,00%</b> | <b>4,75</b>  |
| 1                                  | Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal                                                                                                   |              | Y             | 1,00         |
| 2                                  | Telah terdapat ukuran kinerja sampai dengan individu sebagai turunan kinerja atasannya                                                                                              |              | B             | 0,75         |
| 3                                  | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja                                                                                                                                         |              | A             | 1,00         |
| 4                                  | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan                                                                                                                                        |              | Y             | 1,00         |
| 5                                  | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi                                                                                                               |              | Y             | 1,00         |
| <b>II.</b>                         | <b>KUALITAS PENGUKURAN (7,5%)</b><br><b>Pengukuran Kinerja telah menjadi Kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan</b> | <b>7,50</b>  | <b>96,88%</b> | <b>7,27</b>  |
| 6                                  | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik ( <b>Measureable dan Relevan</b> )                                                                                                  |              | A             | 1,00         |
| 7                                  | IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja                                                                                                                                       |              | A             | 1,00         |
| 8                                  | IKU bawahan telah selaras dengan IKU atasan ( <b>Indikator Kinerja Individu selaras dengan IKU entitas atasnya</b> )                                                                |              | A             | 1,00         |
| 9                                  | Ukuran (Indikator) kinerja bawahan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                                                                              |              | A             | 1,00         |
| 10                                 | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang                                                                                                                                |              | A             | 1,00         |
| 11                                 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan                                                                                                                                           |              | A             | 1,00         |
| 12                                 | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)                                                                                   |              | Y             | 1,00         |
| 13                                 | IKU telah <i>direviu secara berkala</i>                                                                                                                                             |              | B             | 0,75         |
| <b>III.</b>                        | <b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PENGUKURAN (12,5%)</b>                                                                                                                                | <b>12,50</b> | <b>75,00%</b> | <b>9,38</b>  |
| 14                                 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran                                                                                                           |              | B             | 0,75         |
| 15                                 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja                                                                                                                                      |              | B             | 0,75         |

| NO                                                      | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                                                                                                                | BOBOT        | OPD            |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                      |              | JAWABAN        | NILAI        |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4              | 5            |
| 16                                                      | Hasil pengukuran (capaian) kinerja pegawai telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>                                                              |              | B              | 0,75         |
| 17                                                      | Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar) alokasi anggaran                                                                                   |              | B              | 0,75         |
| 18                                                      | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala                                                                                              |              | B              | 0,75         |
| <b>C. PELAPORAN KINERJA (10%)</b>                       |                                                                                                                                                                                                      | <b>10,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>10,00</b> |
| <b>I.</b>                                               | <b>PEMENUHAN PELAPORAN (2%)</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>2,00</b>  |
| 1                                                       | Laporan Kinerja telah disusun                                                                                                                                                                        |              | Y              | 1,00         |
| 2                                                       | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu                                                                                                                                                        |              | Y              | 1,00         |
| 3                                                       | Laporan Kinerja telah dipublikasikan                                                                                                                                                                 |              | Y              | 1,00         |
| 4                                                       | Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP                                                                                                                                    |              | Y              | 1,00         |
| 5                                                       | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU                                                                                                                                         |              | A              | 1,00         |
| <b>II.</b>                                              |                                                                                                                                                                                                      |              |                |              |
|                                                         | <b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (3%)</b><br><b>Lap Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan /kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</b> | <b>3,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>3,00</b>  |
| 6                                                       | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>                                                                                                             |              | A              | 1,00         |
| 7                                                       | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan                                                                                                                       |              | A              | 1,00         |
| 8                                                       | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja                                                                                                                            |              | A              | 1,00         |
| 9                                                       | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan                                 |              | A              | 1,00         |
| 10                                                      | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya                                                                                                               |              | A              | 1,00         |
| 11                                                      | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi                                                                                                |              | A              | 1,00         |
| 12                                                      | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan                                                                                                                                             |              | A              | 1,00         |
| <b>III.</b>                                             |                                                                                                                                                                                                      |              |                |              |
|                                                         | <b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) INFORMASI KINERJA (5%)</b>                                                                                                                                             | <b>5,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>5,00</b>  |
| 13                                                      | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja                                                                                                                   |              | Y              | 1,00         |
| 14                                                      | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>                                                                                                                          |              | A              | 1,00         |
| 15                                                      | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>                                                                            |              | A              | 1,00         |
| 16                                                      | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>                                                                                                                            |              | A              | 1,00         |
| <b>D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (15%)</b> |                                                                                                                                                                                                      | <b>15,00</b> | <b>80,00%</b>  | <b>12,00</b> |
| <b>I.</b>                                               | <b>PEMENUHAN EVALUASI (3%)</b>                                                                                                                                                                       | <b>3,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>3,00</b>  |

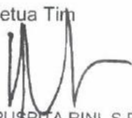
| NO                                                    | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                                       | BOBOT | OPD     |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                       |                                                                                                                             |       | JAWABAN | NILAI |
| 1                                                     | 2                                                                                                                           | 3     | 4       | 5     |
| 1                                                     | Terdapat pedoman atau SOP atau "guidance" tentang bagaimana mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja         |       | Y       | 1,00  |
| 2                                                     | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya                                                |       | Y       | 1,00  |
| 3                                                     | Evaluasi program telah dilakukan                                                                                            |       | Y       | 1,00  |
| 4                                                     | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan                                                                      |       | A       | 1,00  |
| 5                                                     | Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja (entitas dibawah OPD) telah dilakukan                                        |       | Y       | 1,00  |
| 6                                                     | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan                                 |       | A       | 1,00  |
|                                                       |                                                                                                                             |       |         |       |
| II.                                                   | <b>KUALITAS EVALUASI (4,5%)</b><br>Evaluasi Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang Memadai  | 4,50  | 75,00%  | 3,38  |
| 7                                                     | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi                                    |       | B       | 0,75  |
| 8                                                     | Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan |       | B       | 0,75  |
| 9                                                     | Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program                                                     |       | B       | 0,75  |
| 10                                                    | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan             |       | B       | 0,75  |
| 11                                                    | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan                       |       | B       | 0,75  |
| 12                                                    | Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja                                                     |       | B       | 0,75  |
| 13                                                    | Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan                                       |       | B       | 0,75  |
| 14                                                    | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode                                                      |       | B       | 0,75  |
|                                                       |                                                                                                                             |       |         |       |
| III.                                                  | <b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) EVALUASI (7,5%)</b>                                                                           | 7,50  | 75,00%  | 5,63  |
| 15                                                    | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan                                         |       | B       | 0,75  |
| 16                                                    | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja                         |       | B       | 0,75  |
| 17                                                    | Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang                      |       | B       | 0,75  |
| 18                                                    | Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang                      |       | B       | 0,75  |
| 19                                                    | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dimanfaatkan untuk perbaikan langkah selanjutnya                                          |       | B       | 0,75  |
|                                                       |                                                                                                                             |       |         |       |
| <b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b> |                                                                                                                             | 20,00 | 69,58%  | 13,92 |
| I.                                                    | <b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>                                                                                | 5,00  | 70,00%  | 3,50  |
| 1                                                     | Target dapat dicapai                                                                                                        |       | B       | 1,50  |
| 2                                                     | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya                                                                            |       | E       | 0,00  |

| NO                                          | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                            | BOBOT  | OPD     |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|-------|
|                                             |                                                  |        | JAWABAN | NILAI |
| 1                                           | 2                                                | 3      | 4       | 5     |
| 3                                           | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan      |        | A       | 2,00  |
|                                             |                                                  |        |         |       |
| II.                                         | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (15%)          | 15,00  | 69,44%  | 10,42 |
| 4                                           | Target dapat dicapai                             |        |         | 4,17  |
| 5                                           | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya |        |         | 1,25  |
| 6                                           | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan      |        |         | 5,00  |
|                                             |                                                  |        |         |       |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) |                                                  | 100,00 | 82,72%  | 82,72 |

NILAI SAKIP OPD  
PREDIKAT  
INTERPRETASI

82,72  
A  
MEMUASKAN

PENGENDALI TEKNIS  
  
SRI PUJI RAHAYU, S.H.  
NIP. 19660717 198603 2 012

Ketua Tim  
  
MAULINA PUSPITA RINI, S.P., M.M.  
NIP. 19760313 200312 2 008

EVALUATOR  
  
YUDI AGUS SUBAGIYO, SE.  
NIP. 19751231 200604 1 018

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

  
TUTIK DAMAYANTI, S.E.  
NIP. 19710403 199803 2 010

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 364910  
MAGELANG  
56101

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 188/ 23 /440/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 (Nomor 1538);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
  11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA MAGELANG



Lampiran : Surat Keputusan Kepala  
Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Magelang  
Nomor : 188 /23/440/2022  
Tanggal : 7 Januari 2022

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
  - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - e. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - g. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - h. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah, dan urusan umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - k. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  - l. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- :
- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

| TUJUAN RENSTRA                                                     | INDIKATOR TUJUAN RENSTRA                                                             | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                               | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET  |         |         |         |         | SUMBER DATA                                                                                                                             | PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                    |                                                                                      |                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                                                                         |                  |
| 1                                                                  | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6       |         |         |         |         | 7                                                                                                                                       | 8                |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah |                                                       |                                                                       | I = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah<br>II = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah<br><br><b>DO = ( I+II )/2 x 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89,76%  | 91,09 % | 92,03 % | 93,69 % | 93,87 % | Laporan Bidang-bidang pada BPKAD                                                                                                        | Kepala BPKAD     |
|                                                                    |                                                                                      | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah     | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (II)     | A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu<br>B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan<br>C. Persentase Pelaporan Keuangan sesuai SAP<br><br><b>DO = (A+B+C)/3 x 100%</b><br><br>A. Jumlah rancangan dokumen(RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah rancangan dokumen penganggaran (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) x 100%<br>B. Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah SPM yang diterima x 100%<br>C. Jumlah Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah Laporan Keuangan seluruh OPD x 100% | 89,76%  | 91,43 % | 91,43 % | 93,10 % | 93,10 % | Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Kepala BPKAD     |
|                                                                    |                                                                                      | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (II) | Persentase yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang merupakan komposit dari nilai :<br>A. Persentase BMD yang dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89,77 % | 90,76 % | 92,64 % | 94,29 % | 94,64 % | Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Bidang Aset                                                                                | Kepala BPKAD     |

|                                          |                                   |                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |         |         |                                                          |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                          |                                   |                                |                                      | B. Persentase OPD dengan BMD yang sesuai Standar<br>C. Persentase Pengamanan BMD<br>D. Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas<br>E. Persentase BMD yang Dipindahtanggankan<br><br><b>DO = (A+B+C+D+E)/5 x 100%</b><br><br>Merupakan komposit dari nilai indikator Persentase BMD yang dimanfaatkan, Persentase OPD dengan BMD sesuai standar, Persentase pengamanan BMD , Persentase penatausahaan BMD yang berkualitas , Persentase BMD yang dipindahtanggankan dibagi 5 (lima) dan dikalikan 100 (seratus) persen |        |         |         |         |         |                                                          |              |
| Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah |                                |                                      | Jumlah Anggaran PAD dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima dari transfer pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer provinsi serta Pinjaman Daerah<br><br>A. Anggaran PAD<br>B. Anggaran Transfer Pusat<br>C. Anggaran Transfer Provinsi<br>D. Anggaran Pinjaman<br><br>$DO = \frac{A}{(B + C + D)} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                    | 36,16% | 34,61 % | 35,64 % | 36,69 % | 36,69 % | Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah | Kepala BPKAD |
|                                          |                                   | Meningkatnya Pendapatan daerah | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah<br><br>A. Jumlah Pendapatan Asli Daerah<br>B. Jumlah Pendapatan Daerah<br><br><b>DO = (A/B ) x 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,05% | 25,25 % | 25,81 % | 26,37 % | 26,37 % | Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah | Kepala BPKAD |
|                                          |                                   |                                |                                      | Merupakan komposit dari capaian indikator Persentase Peningkatan Potensi PAD (A) dan Persentase Peningkatan Realisasi PAD (B) dibagi 2 dikali 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |         |         |         |                                                          |              |

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



SUSILOWATI

Rencana Aksi

RENCANA AKSI TAHUN 2024  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| No.                                                                 | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                                                    | Satuan | Target Tahunan | Rencana / Target |                |                |                | Penanggungjawab |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                     |                                                                    |                                                                                      |        |                | TW 1<br>Target   | TW 2<br>Target | TW 3<br>Target | TW 4<br>Target |                 |
| 1                                                                   | 2                                                                  | 3                                                                                    | 4      | 5              | 6                | 7              | 8              | 9              | 10              |
| Misi 3 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif |                                                                    |                                                                                      |        |                |                  |                |                |                |                 |
| 1                                                                   | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | %      | 92,03          | 92,03            | 92,03          | 92,03          | 92,03          | Ka. BPKAD       |
| 2                                                                   | Meningkatnya Kemandirian Daerah                                    | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | %      | 35,64          | 35,64            | 35,64          | 35,64          | 35,64          | Ka. BPKAD       |
| 4                                                                   | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                  | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | %      | 91,43          | 91,43            | 91,43          | 91,43          | 91,43          | Ka. BPKAD       |
| 5                                                                   | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah              | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | %      | 92,64          | 92,64            | 92,64          | 92,64          | 92,64          | Ka. BPKAD       |
| 6                                                                   | Meningkatnya Pendapatan daerah                                     | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                 | %      | 25,81          | 25,81            | 25,81          | 25,81          | 25,81          | Ka. BPKAD       |

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

SUSIOWATI SE. MT. M.Sc

Laporan Monev Renaksi Perubahan

| TUJUAN                                                             | SASARAN                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                              | TARGET  | REALISASI |        |        |         | FAKTOR PENDORONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA YANG DILAKUKAN                                                                                                                                                    | REKOMENDASI                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                       |                                                                                      | 2024    | TR I      | TR II  | TR III | TR IV   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah |                                                       | Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah | 39.68%  | 69.68%    | 89.64% | 98.33% | 99.68%  | Melaksanakan belanja daerah sesuai dengan rencana kebutuhan serta berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan                                                                                                             | Masih terdapat Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang di Perangkat Daerah kurang mematuhi ketentuan yang berlaku                                                                                                                                                        | Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan terhadap pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat pengelola barang.                                                           | -                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah     | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (I)                     | 100.00% | 64.37%    | 80.25% | 97.22% | 100.00% | Kepatuhan serta pemahaman para Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang di setiap OPD terhadap regulasi yang berlaku.                                                                                                                                                                                                 | Sering bergatutnya para pejabat pengelola keuangan yang ada di OPD membuat proses penatueshaan keuangan menjadi kurang optimal.                                                                                                                                                  | Melaksanakan koordinasi secara rutin dan intens kepada para pejabat pengelola keuangan OPD dan dilakukan sosialisasi apabila ada perubahan tentang pengelolaan keuangan | Pembinaan secara rutin kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.                                                                            | Kegiatan Bimtek Penatueshaan dan Pelaporan Keuangan melalui aplikasi SIPD, Bekerja sama dengan BKPSDM melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang pada bulan Desember tahun 2024 |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (II)                | 92.64%  | 74.39%    | 99.35% | 99.35% | 99.35%  | Regulasi dari pusat terkait pengelolaan Barang Milik Daerah , Permendagri No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri No.19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.                                                                                                                                    | 1. SDM Pengurus barang yang sering berganti; 2. Tugas pokok fungsi pengurus barang yang terkesan sebagai tugas sampingan; 3. Pengurus barang kesulitan dalam mengidentifikasi BMD yang akan diusulkan penjualan; 4. Pengusulan rencana kebutuhan BMD dari OPD tidak tepat waktu. | Melaksanakan koordinasi serta membangun komitmen bersama dengan OPD                                                                                                     | Pembinaan secara rutin kepada Pejabat Pengelolaan BMD, Kegiatan: Dilatir Pengurus Barang                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatnya kemandirian keuangan daerah                           |                                                       | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | 46.10%  | 46.54%    | 46.65% | 48.79% | 50.44%  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    | Meningkatnya Pendapatan daerah                        | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah                                                 | 33.81%  | 21.34%    | 30.12% | 31.34% | 34.05%  | Terdapat pengembangan beberapa aplikasi pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah, di antaranya yaitu SIAP GIRA (Sistem Aplikasi Gebyar Pajak), Digitali Peta, SIMPAD (Sistem Informasi PAD), SIRETRO (Sistem Retribusi Online), dan SIGMIOP berbasis Web | Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah tata kelola belum berjalan secara karena terbatasnya fungsi-fungsi dalam pemungutan pajak seperti fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan dan fungsi pengawasan                                                  | Meningkatkan koordinasi dalam rangka konektivitas antara sistem di BPKAD dengan sistem lain di lingkungan Pemerintah Kota Magelang agar terbangun lebih baik.           | Peningkatan kapasitas terkait dengan budaya berbagi data, pelatihan petugas pemungut pajak, pengimban data dan penggunaan teknologi digital | -                                                                                                                                                                                                                                       |

PENGUNA ANGGARAN  
NANANG KRISTYONO, S.STP, M.Si  
NIP. 19790517 199802 1 001

## Penghargaan



Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

| RENCANA AKSI TAHUN 2025                                            |                                                       |                                                                                      |         |           |        |        |         |                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                |             |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG             |                                                       |                                                                                      |         |           |        |        |         |                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                |             |               |
| TUJUAN                                                             | SASARAN                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                              | TARGET  | REALISASI |        |        |         | FAKTOR PENDORONG                                                                                               | FAKTOR PENGHAMBAT | UPAYA YANG DILAKUKAN                                                                                                                                                           | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|                                                                    |                                                       |                                                                                      | 2025    | TV I      | TV II  | TV III | TV IV   |                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                |             |               |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah |                                                       | Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah | 99.88%  | 24.97%    | 49.94% | 74.91% | 99.88%  | -                                                                                                              | -                 | -                                                                                                                                                                              | -           | -             |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah     | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 100.00% | 25.00%    | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD (percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) | -                 | Mempercepat implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) melalui penggunaan KKI (Kartu Kredit Indonesia) dalam ekosistem digital belanja Pemerintah Daerah. | -           |               |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 99.78%  | 24.95%    | 49.89% | 74.84% | 99.78%  | -                                                                                                              | -                 | -                                                                                                                                                                              | -           | -             |
| Meningkatnya kemandirian keuangan daerah                           |                                                       | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                    | 50.44%  | 36.01%    | 36.01% | 36.01% | 50.44%  | -                                                                                                              | -                 | -                                                                                                                                                                              | -           | -             |
|                                                                    | Meningkatnya Pendapatan daerah                        | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah                                                 | 34.05%  | 8.51%     | 17.02% | 25.53% | 34.05%  | -                                                                                                              | -                 | -                                                                                                                                                                              | -           | -             |
|                                                                    |                                                       |                                                                                      |         |           |        |        |         |                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                |             |               |
|                                                                    |                                                       |                                                                                      |         |           |        |        |         |                                                                                                                |                   | PENGUNA ANGGARAN                                                                                                                                                               |             |               |
|                                                                    |                                                       |                                                                                      |         |           |        |        |         |                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                |             |               |
|                                                                    |                                                       |                                                                                      |         |           |        |        |         |                                                                                                                |                   | NANANG KRISTYONO, S.STP, M.Si                                                                                                                                                  |             |               |